

**PEMANFAATAN MODAL SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN
RESILIENSI PETANI DALAM MENGHADAPI KONFLIK AGRARIA DI
KOTA BARU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 – 2025**

Skripsi

Oleh

NABILA AZZARA LILASELA AGSA
NPM 2116011006



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PEMANFAATAN MODAL SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN
RESILIENSI PETANI DALAM MENGHADAPI KONFLIK AGRARIA DI
KOTA BARU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 – 2025**

Oleh

NABILA AZZARA LILASELA AGSA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN RESILIENSI PETANI DALAM MENGHADAPI KONFLIK AGRARIA DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 – 2025

Oleh

NABILA AZZARA LILASELA AGSA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan modal sosial oleh petani penggarap Kota Baru dalam memberikan daya tahan atau resiliensi dalam menghadapi konflik agraria dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Kota Baru, Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani penggarap memanfaatkan modal sosialnya dengan membentuk aliansi. Modal sosial ini terbentuk karena adanya jaringan, kepercayaan, dan norma yang kemudian memberikan bantuan dan memperkuat daya tahan petani dalam menghadapi konflik agraria. Dengan pemanfaatan modal sosial, petani mendapatkan akses untuk berdialog dengan pihak yang memiliki kebijakan, mendapatkan bantuan hukum, pelatihan dan edukasi, serta pengorganisasian internal petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi petani penggarap Kota Baru semakin kuat karena adanya aliansi (LBH Bandar Lampung, WALHI Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Akademisi, Mahasiswa, dan lainnya) hal ini ditunjukkan dengan semakin kuatnya ketahanan diri para petani untuk terus melakukan perjuangan dalam mendapatkan hak atas penggarapan di lahan Kota Baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain pemanfaatan modal sosial, solidaritas internal petani juga berperan penting dalam memperkuat resiliensi mereka. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan modal sosial dapat meningkatkan resiliensi petani dalam menghadapi konflik agraria ini, namun keberhasilan perjuangan bergantung pada solidaritas petani Kota Baru itu sendiri.

Kata Kunci : Modal Sosial, Resiliensi, Konflik Agraria, Kota Baru.

ABSTRACT

USE OF SOCIAL CAPITAL TO INCREASE FARMERS' RESILIENCE IN FACING AGRARIAN CONFLICT IN KOTA BARU, SOUTH LAMPUNG 2011 – 2025

By

NABILA AZZARA LILASELA AGSA

This study aims to analyze the use of social capital by Kota Baru sharecroppers in providing resilience in facing agrarian conflicts with the Lampung Provincial Government. This study uses a descriptive qualitative approach method with a case study in Kota Baru, South Lampung. This study uses interview and documentation data collection techniques. Informants in this study were selected with certain considerations. The results of the study show that sharecroppers utilize their social capital by forming alliances. This social capital is formed because of the existence of networks, trust, and norms which then provide assistance and strengthen farmers' resilience in facing agrarian conflicts. By utilizing social capital, farmers gain access to dialogue with parties who have policies, get legal assistance, training and education, and internal farmer organization. The results of the study show that the resilience of the Kota Baru farmers is getting stronger because of the alliance (LBH Bandar Lampung, WALHI Lampung, Solidarity of Sebay Lampung Women, Academics, Students, and others) this is shown by the increasing resilience of the farmers to continue the struggle to obtain the right to cultivate the Kota Baru land. This study concludes that in addition to the use of social capital, internal solidarity of farmers also plays an important role in strengthening their resilience. Therefore, the use of social capital can increase the resilience of farmers in facing this agrarian conflict, but the success of the struggle depends on the solidarity of the Kota Baru farmers themselves.

Keywords: Social Capital, Resilience, Agrarian Conflict, Kota Baru.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMANFAATAN MODAL SOSIAL UNTUK
MENINGKATKAN RESILIENSI PETANI
DALAM MENGHADAPI KONFLIK AGRARIA
DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN TAHUN
2011 – 2025

Nama Mahasiswa : Nabila Azzara Tilasela Agsa

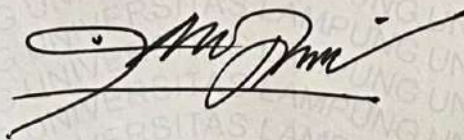
Nomor Pokok Mahasiswa : 2116011006

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

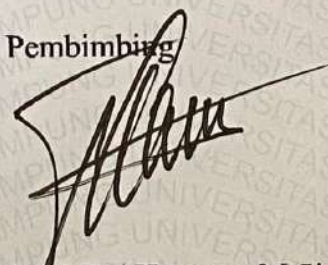
Ketua Jurusan Sosiologi



Damar Wibisono, S.Sos., M.A.

NIP. 19850315201404 1 002

Pembimbing



Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.

NIP. 19601208198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

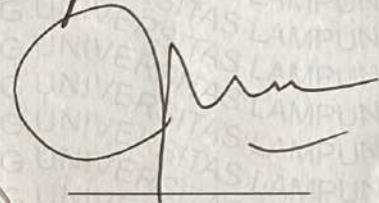
Ketua

: **Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.**



Penguji Utama

: **Drs. Ikram, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

PERNYATAAN

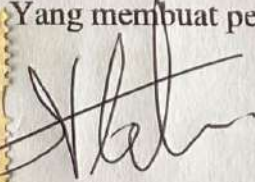
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,




NABILA AZZARA LILASELA AGSA
NPM 2116011006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nabila Azzara Lilasela Agsa. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 April 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak dari Teguh Triono dan Dessy Dianti, S.E., S.Pd.. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya pada tahun 2008-2009 Di TK Gajah Mada. Kemudian pada tahun 2009-2015 penulis telah menyelesaikan sekolah di SDN 2 Rawa Laut. Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018. Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas dengan Jurusan IPS di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Penulis berkontribusi di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi sebagai anggota periode tahun 2022-2023. Penulis menjadi Ketua Umum HMJ Sosiologi pada tahun 2024. Penulis juga telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Gunung Tapa Ilir, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian pada tahun 2025. penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosiologi.

MOTTO

“Hidup yang tidak pernah kamu pertaruhkan tidak akan pernah bisa kamu menangkan”.

“Manusia yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Tapi mereka dibentuk lewat tempaan kesukaran, tantangan, dan air mata. Maka bersabarlah, dengan sabar yang baik”.

“Bunga yang hari ini mekar bukan karena ditanam kemarin. Apa yang indah hari ini adalah hasil dari proses, perjuangan, dan ketekunan”.

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.”
(QS. At-Talaq: 4 dan 8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Cukuplah Allah penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”
(QS. Ali Imran: 173)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas Rahmat Hidayah-Nya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan skripsi ini walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payah penulis, maka dari itu penulis persembahkan skripsi ini kepada*

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Teguh Triono dan Ibunda Dessy Dianti, S.E., S.Pd.

*Atas semua kasih sayang, pengorbanan, doa, bimbingan, serta dukungan yang tak ternilai dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk ridho, cinta, dan ketulusan yang telah mengantarkan penulis hingga berada pada titik pencapaian ini.
Semoga setiap cita-cita dan pencapaian yang diraih penulis dapat menjadi alasan kebanggaan bagi Mama dan Papa.*

Adikku tersayang

M. Rayhan Alfinno Afgan Islammy

Terimakasih banyak untuk segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kedua Nenekku tersayang

Oma Farida Ismawati dan Eyang Narsih

Terimakasih karena selalu memberikan semangat dan menjadi pendorong bagi penulis. Terimakasih banyak atas kasih sayang serta panjatan doa-doa untuk keberhasilanku.

Almamaterku Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu, membentuk karakter, memiliki proses, dan merancang mimpi-mimpi besar. Terima kasih atas setiap ilmu, pengalaman, dan kesempatan berharga yang telah diberikan.

Semoga jejak langkah penulis disini menjadi bagian dari kontribusi nyata bagi almamater tercinta.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Modal Sosial untuk Meningkatkan Resiliensi Petani dalam Menghadapi Konflik Agraria di Kota Baru Lampung Selatan Tahun 2011 – 2025" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
4. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos. selaku Sekretris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat dan kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Dosen Pembahas/Penguji. Terimakasih atas kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung.
8. Pada seluruh Dosen Sosiologi FISIP Universitas Lampung terima kasih atas dukungan, bantuan, penghargaan terhadap potensi mahasiswa, serta kesempatan besar yang telah diberikan. Semoga segala ilmu dan inspirasi yang ditanamkan menjadi bekal yang bermanfaat dalam perjalanan hidup dan karier penulis.
9. Pada seluruh staff dan karyawan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung, terutama Mas Edi dan Mas Daman yang telah membantu keperluan penulis dalam hal pengurusan administrasi selama penulis menempuh studi.
10. Pada Ibu Uun Irawati (Bunda Tini), Bapak Maryono, Bapak Jamari, Bapak Ujang, Mas Hemin, dan Kak Sindi sebagai informan dari masyarakat petani Kota Baru yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan pada penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk memberikan kepercayaan, rasa kekeluargaan, semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
11. Pada Bang Prabowo Pamungkas selaku Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung, Bang Irfan Tri Musri selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Kak Amnesti Amalia selaku Koordinator Program SP Sebay Lampung, Pak Fuad Abdulghani selaku Akademisi (Dosen Sosiologi Universitas Lampung), dan Kak Annisa Despita Sari selaku Mahasiswa Hubungan Internasional yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan pada penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
12. Yang teristimewa teruntuk kedua orang tuaku Papa Teguh Triono dan Mama Dessy Dianti yang selalu memberikan doa, motivasi, perhatian, kasih sayang yang luar biasa, cinta yang sangat besar, semangat, memberikan harapan dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi anak perempuan

pertamamu selama ini. Terimakasih teramat dalam atas segalanya sehingga Nabila bisa berada di titik ini. Semoga Nabila dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Papa dan Mama.

13. Teruntuk kedua nenekku Oma Farida dan Eyang Narsih terimakasih atas kasih sayang yang besar, dukungan, dan panjatan doa yang selalu diberikan kepada Nabila selama ini. Semoga kelak cucung perempuan pertamamu ini dapat membalas kebaikan dan dapat membanggakan Oma dan Eyang.
14. Teruntuk adikku terhebat M. Rayhan Alfinno Afgan Islammy yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan selalu berbagi pandangan satu sama lain.
15. Teruntuk Kayla Akira Putri Setia Budi dan semua saudara persepupuan yang telah memberikan semangat, memberikan bantuan, menjadi sosok yang menghibur penulis, dan menjadi sosok yang dapat diandalkan bagi penulis.
16. Teruntuk sahabatku sekaligus rumahku, Clarissa Artanti Sidik. Terimakasih telah menghadirkan tawa dan menjadi sosok yang sangat penulis percaya. Jika hidup ini adalah perjalanan panjang, maka diriku bersyukur telah berjalan sejauh ini bersama denganmu.
17. Teruntuk kekasih hatiku Roby Rakhmadi, terimakasih telah menemani dari panjangnya proses perkuliahanku dan percaya untuk tetap menungguku. Seluruh perjalanan denganmu, hari-hari bersamamu, dan hal-hal kecil darimu menjadi dorongan bagi diriku.
18. Teruntuk sohibku Neapolitan dan teruntuk kolegaku NBA, terimakasih tetap bersama hingga saat ini.
19. Teruntuk teman terbaikku Dhea Hildayah, Herlin Nurristania Aulia, Salwa Azzahra, terimakasih telah menjadi sosok yang memberikan senyuman selama perkuliahan ini, semoga tetap seperti itu kedepannya.
20. Teman KKN Desa Gunung Tapa Ilir yaitu Shinta, Hani, Stefany, Jaya, Yogi, dan Andra. Terimakasih karena menjalani KKN dengan begitu menyenangkan.
21. Kepada Nabila Azzara Lilasela Agsa, terimakasih telah berproses sampai berada di titik ini. Jatuh, bangun, sakit, senang, telah dilalui selama berproses. Tetaplah berani dan kuatkanlah pundak untuk membangun kesuksesan.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konflik	11
2.1.1. Pengertian Konflik	11
2.1.2. Jenis-Jenis Konflik	13
2.2. Konflik Pertanahan	15
2.2.1. Pengertian Konflik Pertanahan.....	15
2.2.2. Faktor Penyebab Konflik Lahan	16
2.2.3. Tipologi Konflik Pertanahan	18
2.3. Alih Fungsi Lahan	21
2.3.1. Pengertian Alih Fungsi Lahan.....	21
2.3.2. Lahan Pertanian dan Non Pertanian	22
2.3.3. Tipologi Alih Fungsi Lahan	23
2.4. Resiliensi	24
2.4.1. Indikator Resiliensi.....	26
2.4.2. Faktor-Faktor	30
2.5. Landasan Teori Modal Sosial	31
2.5.1. Indikator Modal Sosial	33
2.5.2. Bentuk-Bentuk Modal Sosial.....	36
2.6. Penelitian Terdahulu	38

2.7. Kerangka Berpikir	41
------------------------------	----

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	45
3.2. Fokus Penelitian	46
3.3. Lokasi Penelitian	47
3.4. Informan Penelitian	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data	55
3.6. Teknik Analisis Data	56
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	58

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Deskripsi Umum Kabupaten Lampung Selatan	59
4.2. Deskripsi Umum Kecamatan Jati Agung	60
4.3. Deskripsi Umum Desa Sindang Anom.....	61
4.4. Deskripsi Umum Desa Sinar Rejeki.....	70
4.5. Deskripsi Umum Desa Purwotani	78
4.6. Deskripsi Umum Kawasan Kota Baru.....	86

V. HASIL DAN PENELITIAN

5.1. Modal Sosial: Kunci Perlawanan dan Kekuatan Petani Kota Baru	94
5.1.1. Jaringan sebagai dasar pembangun kekuatan kolektif	99
5.1.2. Kepercayaan sebagai pondasi untuk tindakan kolektif.....	128
5.1.3. Norma sebagai instrumen pendorong partisipasi sosial.....	136
5.2. Modal Sosial Menghubungkan: Memperluas Jaringan dan Memperkuat Perjuangan.....	144
5.3. Peningkatan Resiliensi: Ditindas Ketidakadilan Petani Kota Baru Tetap Bertahan.....	149
5.3.1. Adaptasi sebagai kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi konflik.....	151
5.3.2. Ketahanan diri sebagai bentuk kegigihan dalam perjuangan.....	157
5.3.3. Identifikasi solusi sebagai upaya mengatasi konflik agraria	161

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan164
6.2. Saran166

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	39
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian.....	49
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sindang Anom	64
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sindang Anom	64
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Desa Sindang Anom	65
Tabel 6. Lembaga Kemasyarakatan Desa Sindang Anom	66
Tabel 7. Penggunaan Lahan Desa Sindang Anom	66
Tabel 8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sindang Anom	67
Tabel 9. Pembagian Wilayah Desa Sindang Anom	68
Tabel 10. Jumlah Penduduk Desa Sinar Rejeki	72
Tabel 11. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sinar Rejeki	72
Tabel 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa Sinar Rejeki	73
Tabel 13. Sarana dan Prasarana Desa Sinar Rejeki.....	74
Tabel 14. Penggunaan Lahan Desa Sinar Rejeki	74
Tabel 15. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sinar Rejeki	75
Tabel 16. Pembagian Wilayah Des Sinar Rejeki	76
Tabel 17. Jumlah Penduduk Desa Purwotani.....	80
Tabel 18. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Purwotani	81
Tabel 19. Sarana dan Prasarana Desa Purwotani	81
Tabel 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa Purwotani.....	82
Tabel 21. Mata Pencaharian Penduduk Desa Purwotani	83
Tabel 22. Pembagian Penggunaan Lahan Desa Purwotani	83
Tabel 23. Pembagian Wilayah Desa Purwotani.....	84

Tabel 24. Jumlah Petani Penggarap Kota Baru.....	89
Tabel 25. Jenis Tanaman Petani Penggarap.....	89
Tabel 26. Hibah Lahan Kota Baru	90
Tabel 27. Ringkasan Hasil Temuan Aspek Modal Sosial.....	94
Tabel 28. Ringkasan Temuan Aksi Kolektif.....	96
Tabel 29. Ringkasan Hasil Penelitian Bentuk Modal Sosial Digunakan	144
Tabel 30. Ringkasan Hasil Temuan Aspek Resiliensi	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	44
Gambar 2. Peta Wilayah Desa Sindang Anom	62
Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Sindang Anom.....	69
Gambar 4. Peta Wilayah Desa Sinar Rejeki.....	71
Gambar 5. Struktur Pemerintahan Desa Sinar Rejeki	77
Gambar 6. Peta Wilayah Desa Purwotani	79
Gambar 7. Struktur Pemerintahan Desa Purwotani	85
Gambar 8. Gerbang Kota Baru Lampung Selatan	86
Gambar 9. Peta Luas Lahan Kota Baru.....	87
Gambar 10. Gedung Gubernur	88
Gambar 11. Gedung DPRD.....	88
Gambar 12. Masjid Agung Kota Baru	88
Gambar 13. Peta Hibah Lahan Kota Baru.....	90
Gambar 14. Peta Sebelum Pergantian Hibah Lahan Kota Baru.....	92
Gambar 15. Peta Pergantian Hibah Lahan Kota Baru	92
Gambar 16. Diagram Kontribusi Aliansi Petani Kota Baru.....	98
Gambar 17. Pengusuran Tanaman Tumbuh Petani Kota Baru	100
Gambar 18. Mengawal proses penyelidikan	101
Gambar 19. Diskusi WALHI Lampung	104
Gambar 20. KALABAHU 2023	108
Gambar 21. Surat Pemberitahuan	110
Gambar 22. Surat Pemberhentian Penyelidikan.....	110
Gambar 23. Diskusi Bersama Aliansi	115

Gambar 24. Diskusi LBH Bandar Lampung	116
Gambar 25. Diskusi - Konsolidasi di LBH Bandar Lampung	120
Gambar 26. Aksi demonstrasi di Polda Lampung	123
Gambar 27. Aksi Demonstrasi di Gedung ATR/BPN	124
Gambar 28. Kampanye Media Sosial Instagram.....	126
Gambar 29. Penyebaran Informasi melalui <i>Podcast</i>	127
Gambar 30. Upacara Kemerdekaan di Kota Baru.....	133
Gambar 31. Nonton Bareng Petani Kota Baru.....	134
Gambar 32. Makan dan Doa Bersama Petani Kota Baru.....	135
Gambar 33. Postingan mengenai Kota Baru	142
Gambar 34. Diskusi jaringan internal petani Kota Baru	157
Gambar 35. Sistem Perlindungan Kolektif	161

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris, ditunjukkan dengan statusnya sebagai negara kepulauan dan pertanian menjadi basis utama perekonomian nasional. Bagi sektor pertanian, lahan menjadi aktor utama dan tak tergantikan yang tentu saja sebagai arena untuk bercocok tanam guna menghasilkan produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dengan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional (Boediningsih, W. dan Cahyono, S.B. 2023).

Penyempitan lahan, ketimpangan kepemilikan lahan, alih fungsi lahan menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya konflik agraria. Konflik agraria ini terjadi dalam tiga golongan yaitu antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis (investor), dimana mereka memperebutkan sumber-sumber agraria seperti lahan, bahan tambang, dan sumber air. Oleh karena itu, dalam pandangan teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun

pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan (Rusydi Syahra, 2003). Konflik sosial seringkali tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Pada kondisi seperti ini, masyarakat petani tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri, oleh karenanya diperlukan modal sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Maka, sejatinya modal sosial merujuk pada kapasitas individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dari hubungan sosial atau dalam kelompok sosial untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan kolektif yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam konsep umum, klaim mengenai modal sosial hanya sebatas sumber daya yang dapat diakomodir oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Dalam bahasan mendalam, modal sosial harus dipandang bermakna seperti menjadi investasi, memberikan keuntungan atau memberikan manfaat untuk kepentingan pribadi. Modal sosial adalah bagian dari kehidupan, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan, yang kesemua komponen itu mendorong individu atau kelompok bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan (Field, J. 2003).

Dalam penelitian ini konflik agraria antara petani Kota Baru dan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi contoh nyata dari pemanfaatan modal sosial sebagai resiliensi petani dalam menghadapi konflik. Petani penggarap Kota Baru sejatinya sudah ada sejak tahun 1950-an yang merupakan transmigran swakarsa dari daerah Jawa. Mereka melakukan penggarapan sejak tanah Kota Baru masih berstatus Kawasan Hutan Produksi Register 40 Gedong

Wani. Pada tahun 1970 diterbitkan izin pengelolaan lahan kehutanan di tanah tersebut dari Dinas Kehutanan untuk beberapa perusahaan, salah satunya PT Mitsugoro. Para transmigran pada saat itu akhirnya bekerja sebagai buruh di perusahaan tersebut, hingga tahun 1984 PT Mitsugoro mengalami kebangkrutan, namun masih menyisakan Hak Guna Usaha (HGU) selama 20 tahun kedepan yang kemudian lahan tersebut dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang menjadi titik balik bagi petani untuk menguasai kembali lahan Kota Baru, hingga pada tahun 2001 petani dilibatkan dalam pembinaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) oleh pemerintah untuk melakukan penanaman sebagai bentuk rehabilitasi kawasan hutan dan aktivitas tersebut terus dilakukan di tanah Kota Baru (Setiawan, B. 2024).

Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan kebijakan pembangunan Kota Baru untuk pusat pemerintahan Provinsi Lampung di wilayah tersebut dengan rencana penggunaan lahan seluas 1300 Hektar (Perda No. 12 Tahun 2009). Dengan adanya alih fungsi lahan di Kota Baru untuk kepentingan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan Rp 5.000.000,- per kepala keluarga petani sebagai bentuk kompensasi dan kemudian mengeklaim tanah tersebut untuk pembangunan pusat Kota Baru atas persetujuan Dinas Kehutanan saat itu (Saputra, T. 2023).

Pada faktanya proyek pembangunan Pusat Kota Baru mangkrak yang disebabkan masa kepemimpinan Gubernur saat itu, Sjachroedin Z.P telah selesai pada tahun 2014. Tidak ada kelanjutan pembangunan Pusat Kota Baru dari Gubernur Lampung selanjutnya, Ridho Ficardo, petani Kota Baru kembali melakukan penggarapan di tanah tersebut. Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai penyewaan lahan pusat Kota Baru yang mangkrak, dimana dalam pembahasannya petani penggarap diperbolehkan untuk melakukan penanaman di lahan tersebut dengan sewa lahan hingga tahun 2024. Masyarakat petani menolak bahasan dalam sosialisasi tersebut, sehingga penyewaan lahan Kota Baru tidak terlaksana (mediarepublika.com. 2022).

Pada awal tahun 2022 saat kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, dikeluarkan kembali kebijakan mengenai sewa lahan kepada para petani yang melakukan penggarapan di lahan pembangunan Pusat Kota Baru yang mangkrak itu sebesar Rp 300,-/Meter atau Rp 3.000.000,-/Hektar per tahunnya (SK Gubernur No.G/293/VI.02/HK/2022). Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari Petani Kota Baru karena dalam penerbitan surat keputusan para petani tidak dilibatkan (Nashrullah, N. 2024).

Aksi perlawanan dalam bentuk demonstrasi berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai sewa lahan pada tahun 2022 yang tidak melibatkan partisipatif petani Kota Baru dan tidak membuka ruang bagi masyarakat petani Kota Baru untuk dapat melakukan diskusi mengenai pemanfaatan lahan tersebut. Selain itu, petani Kota Baru juga seringkali mendapatkan perlakuan intimidasi dari Satuan Petugas (Satgas)

yang merupakan anggota Satpol-PP Provinsi Lampung yang dibentuk oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Intimidasi yang diberikan pada petani berupa paksaan untuk membayar sewa lahan, pengusiran dari lahan Kota Baru, dan ancaman. Selain itu, aksi seruan ini berangkat dari ketidaksesuaian program yang digaungkan oleh Gubernur Lampung saat ini mengenai Petani Berjaya. Melihat kondisi pada hari ini, para petani, khususnya di Kota Baru justru dipinggirkan, dikerdilkan, dan dijauhkan dari kata sejahtera.

Petani Kota Baru melakukan aksi tidak untuk mengklaim hak atas tanah namun untuk memperjuangkan hak penggarapan atas objek tanah yang sudah dilakukan secara turun temurun sejak lama di lahan tersebut selama belum dilanjutkan pembangunan untuk pusat Kota Baru dan juga untuk menghentikan intimidasi horizontal yang terjadi. Ratusan petani Kota Baru yang merupakan gabungan dari tiga desa sekitar, yaitu Desa Purwotani, Desa Sinar Rejeki, dan Desa Sindang Anom bersama dengan LBH Bandar Lampung dan WALHI Lampung melakukan aksi penolakan pada 24 November 2022 yang merumuskan tuntutan kepada Gubernur Lampung untuk mencabut surat keputusan Gubernur Lampung Nomor G/293/V1.02/HK/2022 tentang penetapan sewa lahan di tanah Pusat Kota Baru, menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap petani di Kota Baru dengan membubarkan Satuan Petugas (Satgas) yang dibentuk oleh BPKAD, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi petani Kota Baru untuk dapat melakukan diskusi atau negosiasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pemanfaatan lahan (YouTube Diskursus Net, 2022).

Aksi demonstrasi para petani Kota Baru yang menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai sewa lahan tidak mendapatkan umpan balik. Para petani Kota Baru kembali mengadakan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada 4 Januari 2023 (Riduan, A. 2023). Pada aksi demonstrasi kedua, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung kemudian memberikan umpan balik, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani Kota Baru dan menerangkan apabila terdapat aktivitas pemanfaatan di lahan milik Pemerintah Provinsi dilakukan sewa menyewa lahan dan masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku (bongkarpost.co.id., 2023). Selain itu, kepala BPKAD menerangkan bahwa uang sewa yang berhasil masuk kedalam pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp690.000.000 dan akan dipergunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kota Baru (Khoiriah, 2023).

Setelah dua kali masyarakat petani Kota Baru melakukan aksi, seruan itu tidak mendapatkan umpan balik yang berpihak pada petani justru pemerintah memperlihatkan bahwa petani memang mereka desain untuk tetap tertindas, terpinggirkan, dan tidak sejahtera. Para petani dipaksa untuk menyewa lahan dari hasil produksi tani yang cenderung fluktuatif.

Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, aksi seruan penolakan kembali dilakukan oleh masyarakat Petani Kota Baru pada 25 September

2023 di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung. Masyarakat petani Kota Baru kembali menuntut Pemerintah Provinsi untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung mengenai sewa lahan, selain itu para petani bersama LBH Bandar Lampung dan WALHI Lampung juga menuntut agar menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani Kota Baru, dan menuntut pemerintah agar dapat mewujudkan reforma agraria (Khoiriah, 2023).

Kemudian permasalahan tersebut meningkat pada Maret 2024. Lahan garapan milik salah satu petani Kota Baru, dimana lahannya seluas 2 Hektar yang baru ditanami bibit singkong berumur tiga bulan digusur secara paksa oleh Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan 4 traktor bajak (Yulisa, L.2024). Penggusuran ini terjadi karena lahan tersebut masih ditanami kembali pada tahun 2024. Apabila merujuk pada kilas balik sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun 2022 silam, bahwa BPKAD memberikan waktu untuk petani dapat menyewa lahan dan ditanami hingga panen akhir 2023. Meskipun begitu, pada waktu sebelum terjadi penggusuran, antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat petani Kota Baru telah melakukan kesepakatan untuk mengadakan dialog bersama BPKAD, DPRD, Inspektorat, dan KPK guna mencari jalan tengah dari keadaan tersebut. Keadaan faktual yang terjadi saat itu, menunjukkan bahwa BPKAD tidak menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk melakukan dialog, justru melakukan penggusuran secara sepihak (nenemonews.com. 2024).

Langkah kriminal Pemerintah Provinsi Lampung terhadap petani Kota Baru dengan menggusur lahan tanaman menggunakan traktor atas dalih penertiban lahan dilaporkan ke Polda Lampung oleh ratusan tani Kota Baru pada bulan Maret 2024. Laporan dari petani Kota Baru diterima oleh Polda Lampung dengan nomor laporan STTPL/B/120/III/2024/SPKT/POLDA LAMPUNG (Ferrer, V.S. 2024). Mendapati laporan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan balik kelompok tani Kota Baru melalui pemilik traktor. Soleha sebagai pemilik traktor melaporkan pelanggaran sesuai KUHP Pasal 406 dan Pasal 170 tentang pengrusakan barang milik orang lain. Laporan ini tertuang dalam nomor 121/B/III/2024/SPKT/POLDA LAMPUNG (Darma, I.D. 2024).

Pada bulan Mei 2024, petani Kota Baru yang menjadi korban pengusuran yaitu Uun Irawati atau Bunda Tini melakukan pemeriksaan di Polres Lampung Selatan sebagai terlapor atas tuduhan pengrusakan traktor (Amri, A. 2024). Kemudian pada bulan Juni 2024, Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak Bunda Tini, petani Kota Baru sebagai tindak lanjut dari laporan pengrusakan traktor (Josua, 2024). Tindakan dari Polres Lampung Selatan memicu reaksi masyarakat petani Kota Baru, karena kasus pengusuran lahan dan bibit singkong milik Bunda Tini sebagai petani Kota Baru justru berjalan sangat lambat dan dinilai sebagai bentuk disparitas Polres Lampung Selatan (lappung.com. 2024). Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Lampung (SPL) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung melakukan aksi massa didepan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertahanan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN) di Jakarta pada Juni 2024. Dalam aksi ini, masyarakat petani Kota Baru meminta Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi terhadap penerbitan sertifikat hak pakai tanah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung di tanah Kota Baru, Lampung Selatan (ylbhi.or.id. 2024).

Berdasarkan dari data dan fakta diatas, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur mengenai konflik agraria, terutama dalam konteks peran modal sosial yang belum banyak dieksplorasi. Dengan menganalisis intensitas modal sosial sebagai salah satu upaya kunci bagi petani dalam menghadapi konflik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap konflik agraria dari penelitian-penelitian terdahulu yang belum dapat diselesaikan ataupun yang akan datang. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai **“Pemanfaatan Modal Sosial untuk Meningkatkan Resiliensi Petani dalam Menghadapi Konflik Agraria di Kota Baru Lampung Selatan Tahun 2011 – 2025”** untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditarik rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Pemanfaatan Modal Sosial Petani dalam Menghadapi Konflik Agraria di Kota Baru Lampung Selatan?
- 2) Bagaimana resiliensi Petani dalam Menghadapi Konflik Agraria di Kota Baru Lampung Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modal sosial dapat dimanfaatkan oleh petani penggarap Kota Baru untuk memberikan daya tahan atau resiliensi dalam menghadapi konflik agraria.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi literatur, pengalaman, wawasan, acuan, serta pengetahuan akademik khususnya dalam kajian sengketa lahan agraria. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang sejalan dengan matakuliah sosiologi mengenai modal sosial dan konflik sosial. Selain itu, harapannya penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam menambah wawasan pada Sosiologi Lingkungan.
- 2) Secara praktis penelitian ini sebagai salah satu upaya advokasi dalam upaya penyelesaian konflik sengketa lahan agraria dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan publik agar dirancang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konflik

2.1.1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata *configere* yang berarti saling memukul. Secara etimologis konflik diartikan sebagai pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Teori konflik melihat pertikaian dalam sistem sosial dan memandang bahwa di dalam masyarakat tidak selamanya tercipta keteraturan. Teori konflik juga melihat adanya dominasi, paksaan, dan kekuasaan dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan (Tualeka, W.N. 2017). Konflik adalah benturan yang terjadi antar dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya (Fuad dan Maskanah, 2000).

Menurut Karl Marx, konflik terjadi karena perbedaan kepentingan kelas sosial yang disebabkan oleh industrialisasi yang hanya mengejar keuntungan. Menurutnya, perbedaan kelas sosial antara Borjuis (penguasa) dan Proletar (pekerja) menjadi akar terjadinya ketimpangan dan hal itu mampu memicu konflik karena terdapat perbedaan dalam mengakses sumber kekuasaan (Nugroho, A.C. 2021).

Menurut Lewis A. Coser, konflik dengan kelompok lain memiliki tujuan untuk memperkuat identitas kelompok dan melindungi kelompok agar tidak lenyap akibat pelakuan dunia sosial sekelilingnya. Konflik menurutnya terbagi menjadi dua macam, pertama konflik realistik yang bermula dari kekecewaan terhadap suatu kebijakan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Kedua, konflik non-realistik yang tidak berasal dari sebuah tuntutan atau kebijakan, tetapi didorong oleh permasalahan bersifat ideologis (Tualeka, W.N. 2017).

Jadi konflik realistik dapat berbentuk seperti aksi protes dari beberapa orang yang merasa tidak puas dengan keputusan atau kebijakan yang ada karena merugikan bagi mereka. Sedangkan konflik non-realistik seperti pertengkaran antara tetangga atau pertengkaran antara rekan kerja, dimana konflik non realistik lebih didorong karena perasaan pribadi, emosional atau kesalahpahaman.

2.1.2. Jenis-Jenis Konflik

Rusdiana mengklasifikasikan jenis-jenis konflik menjadi enam bagian, sebagai berikut (Diwantoro, D.B. 2023) :

1) Konflik Pribadi

Konflik pribadi terjadi antara dua individu yang saling bertentangan, karena perbedaan pandangan, keyakinan, norma, dan lainnya. Contoh dari konflik pribadi ini termasuk perselisihan antara dua teman, konflik antara suami dan istri, atau perbedaan pendapat antar saudara.

2) Konflik Antar Kelompok

Konflik antar kelompok terjadi antara dua kelompok atau lebih dikarenakan perbedaan kepentingan, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Contoh dari konflik antar kelompok ini seperti konflik antar *supporter* sepak bola, tawuran pelajar antar sekolah, atau perselisihan antar partai politik.

3) Konflik Antar Kelas Sosial

Konflik antar kelas melibatkan status sosial individu yang ada di masyarakat. Konflik ini dapat terjadi karena perbedaan kepentingan, pandangan, atau perekonomian. Contoh dari konflik ini seperti terjadinya demo antara karyawan dan perusahaan, demo buruh kepada pemerintah, petani berkonflik dengan tuan tanah, dan lain sebagainya.

4) Konflik Rasial

Konflik rasial terjadi antara kelompok ras yang berbeda. Konflik rasial terjadi ketika kelompok-kelompok ras yang berbeda saling berhadapan karena perbedaan pandangan yang mengutamakan ras mereka sendiri sebagai yang paling unggul. Konflik ini sering kali dipicu oleh persepsi stereotip terhadap ciri-ciri fisik atau budaya kelompok ras lain, yang menyebabkan ketegangan dan diskriminasi antar kelompok.

5) Konflik Politik

Konflik politik merupakan suatu bentuk pertentangan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan, kepentingan, atau ideologi di antara kelompok-kelompok pendukung partai. Contoh konkret dari konflik politik termasuk pertikaian antara pendukung dua calon presiden yang berbeda, serta perselisihan antara dua kubu partai politik yang saling berkompetisi.

6) Konflik Pertanahan/Agraria

Konflik agraria umumnya terjadi antara berbagai pihak, seperti antara petani dan pemerintah, petani dan tuan tanah, atau antar individu yang memiliki klaim berbeda atas hak kepemilikan, akses, dan pemanfaatan lahan. Konflik ini sering dipicu oleh ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam pengaturan hak atas tanah, perbedaan kepentingan ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

2.2. Konflik Pertanahan

2.2.1. Pengertian Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, lembaga pemerintahan yang cenderung sudah berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak secara sosio-politis (Setyowati, D. 2023).

Konflik pertanahan adalah sengketa atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pertanahan. Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Konflik pertanahan mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah seperti kaum tani, nelayan, dan masyarakat adat (Wanseri, 2019).

2.2.2. Faktor Penyebab Konflik Pertanahan

Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum (Zakie, M. 2016) :

1) Faktor Hukum

a. Tumpang Tindih Peraturan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang awalnya dirancang sebagai landasan hukum utama dalam pengaturan sumber daya agraria di Indonesia, kini mengalami pergeseran perannya karena munculnya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak lagi mengakui UUPA sebagai induk. Akibatnya, UUPA kehilangan fungsinya sebagai payung hukum utama dalam kebijakan pertanahan dan justru sering kali berbenturan secara substansial dengan peraturan sektoral yang lebih baru. Hal ini berdampak pada tidak jelasnya hukum atau peraturan terkait agraria.

b. Tumpang Tindih Peradilan

Saat ini, terdapat tiga jenis peradilan yang berwenang menangani konflik pertanahan, yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam beberapa kasus, hasil putusan dari peradilan perdata tidak selalu selaras dengan putusan di peradilan pidana, terutama jika konflik tersebut melibatkan unsur tindak pidana.

2) Faktor Non Hukum

a. Alih Fungsi Lahan

Konflik agraria dapat terjadi ketika lahan yang sama diklaim atau digunakan oleh beberapa pihak dengan tujuan berbeda, seperti antara kebutuhan pertanian, pemerintahan, industri, dan pemukiman.

b. Nilai Tanah Meningkatkan

Peningkatan nilai ekonomi lahan, terutama di daerah perkotaan atau yang memiliki potensi sumber daya alam, sering menjadi penyebab konflik karena menarik minat berbagai pihak untuk menguasainya untuk dialihfungsikan menjadi tempat wisata, perumahan, atau yang lainnya.

c. Kesadaran Masyarakat Meningkatkan

Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak-hak atas tanah mendorong lebih banyak pihak untuk mempertahankan atau memperjuangkan kepemilikan dan penggunaan lahan.

d. Pertambahan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan permintaan terhadap lahan untuk berbagai kebutuhan, termasuk perumahan, pertanian, dan infrastruktur, namun luas lahan sama sekali tidak bertambah.

e. Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan memaksa banyak orang untuk memanfaatkan lahan secara ilegal atau tidak sesuai peruntukan, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang dapat memicu sengketa

2.2.3. Tipologi Konflik Pertanahan

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tipologi konflik pertanahan dapat diklasifikasikan menjadi 8 bagian, yaitu (Zakie, M. 2016) :

- 1) Penguasaan dan pemilikan tanah mengacu pada perbedaan persepsi, nilai, atau pandangan, serta kepentingan terkait status penguasaan atas sebidang tanah tertentu, baik yang belum atau tidak memiliki hak (tanah negara) maupun yang sudah memiliki hak yang melekat pada pihak tertentu.
- 2) Penetapan hak dan pendaftaran tanah, menyangkut perbedaan persepsi, nilai, atau pandangan, serta kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, sehingga menimbulkan anggapan ketidaksahan penetapan atau perizinan di bidang pertanahan.
- 3) Batas atau letak bidang tanah, merujuk pada perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan terkait dengan letak, batas, dan luas bidang tanah yang diakui oleh satu pihak, baik yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

- 4) Pengadaan tanah, berkaitan dengan perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi, atau nilai terkait status hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pengadaan tanah, serta mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan, atau pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi.
- 5) Tanah obyek *landreform*, mengacu pada perbedaan persepsi, nilai, atau pandangan, serta kepentingan mengenai prosedur penegasan status penguasaan dan kepemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek, obyek, dan pembagian tanah yang menjadi obyek *landreform*.
- 6) Tuntutan ganti rugi tanah partikelir, berkaitan dengan perbedaan persepsi, pandangan, kepentingan, atau nilai mengenai keputusan pemerintah terkait kesediaan memberikan ganti rugi atas tanah partikelir yang dilikuidasi.
- 7) Tanah ulayat, menyangkut perbedaan persepsi, nilai, atau pandangan, serta kepentingan terkait status tanah ulayat dan masyarakat hukum adat atas areal tertentu, baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, namun dikuasai oleh pihak lain.
- 8) Pelaksanaan putusan pengadilan, mengacu pada perbedaan persepsi, nilai, atau pandangan, serta kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Menurut Maria S.W Soemarjono, tipologi konflik petanahan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu (Wanseri, 2019):

- 1) Kasus pertanahan yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atau daerah perebunan, hutan, dan lain sebagainya.
- 2) Kasus pertanahan yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan *Landreform*.
- 3) Kasus pertanahan yang berkenaan dengan akses penyediaan tanah untuk pembangunan.
- 4) Kasus perdata berkenaan dengan permasalahan tanah.
- 5) Kasus yang berkenaan dengan tanah ulayat.

Menurut Hasim Purba, tipologi konflik pertanahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu (Setyowati, D. 2023):

- 1) Konflik pertanahan horizontal, adalah konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- 2) Konflik pertanahan vertikal, adalah konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.
- 3) Konflik pertanahan horizontal-vertikal, adalah konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan (investor) yang memiliki dukungan pemerintah dan preman.

2.3. Alih Fungsi Lahan

2.3.1. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan yang saat ini lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebuah kawasan lahan dari fungsi semulanya menjadi fungsi lain yang memiliki dampak (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk fungsi lain yang disebabkan oleh faktor keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih maju dan layak. Alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan saat ini masih sulit dikendalikan, lahan sawah menjadi taruhannya. Sebagian besar lahan yang beralih fungsi tersebut justru statusnya memiliki produktivitas tinggi. Seperti lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan beralokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang pengembangan produksi padi telah maju (Fitrianingsih, E. 2017).

Perubahan status lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian yang muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Luas lahan tidak

akan pernah bertambah luas akan tetapi permintaan terhadap tanah terus meningkat untuk sektor nonpertanian. Proses alih fungsi lahan dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain (pemerintah). Proses konversi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni, hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi asimetrik informasi diantara keduanya. Sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan bargaining. Sedangkan tipe yang kedua adalah konversi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai planner yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya (Runtoko, P. 2010).

2.3.2. Lahan Pertanian dan Non Pertanian

Definisi lahan dalam pengertian lebih luas adalah termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun sekarang, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau telah dilakukan tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu (Achsanuddin, U.A.A., dkk. 2023).

Lahan pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk produksi pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegal termasuk pula

perkebunan, tambak, ternak, ladang, dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi masyarakat memiliki hak atas lahan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha pertanian.

Sedangkan lahan non pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha atau, pembangunan, atau kegiatan selain pertanian. Penggunaan lahan non pertanian seperti tanah perumahan (digunakan untuk membangun tempat tinggal, pariwisata, pemakaman, dan lain-lain), tanah perusahaan (digunakan untuk pertokoan, gudang, bank, mall, hotel, dan lain-lain), tanah industri (digunakan untuk pembangunan pabrik), dan tanah untuk jasa (digunakan untuk membangun kantor pemerintah, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan sarana umum) (Fitrianingsih, E. 2017).

2.3.3. Tipologi Alih Fungsi Lahan

Menurut Sihaloho, alih fungsi atau konversi lahan dapat dibagi dalam tujuh tipologi, yaitu (Fitrianingsih, E. 2017) :

- 1) Konversi Gradual. Dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang atau tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku konservasi.
- 2) Konversi Sistematis. Dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah.

- 3) Konversi adaptasi demografi. Konversi ini disebabkan respon terhadap pertumbuhan penduduk, dimana dengan meningkatnya jumlah populasi akan meningkat juga kebutuhan lahan untuk tempat tinggal.
- 4) Konversi lahan yang disebabkan masalah sosial. Alih fungsi lahan ini terjadi akibat terdesaknya ekonomi dan perubahan kesejahteraan.
- 5) Konversi tanpa beban. Dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung.
- 6) Konversi adaptasi agraris. Disebabkan karena terdesaknya ekonomi dan keinginan untuk meningkatkan hasil pertanian.
- 7) Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk. Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pembangunan perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan dan lainnya.

2.4. Resiliensi

Wolin dan Wolin mengartikan resiliensi sebagai proses usaha untuk menghadapi kesulitan, memperbaiki diri, tetap teguh saat berhadapan dengan kemalangan serta kemampuan beradaptasi. Tidak jauh berbeda, Reivich dan Shatte mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi ketika menghadapi kejadian berat atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya, Pahlevi dan Salve menjelaskan bahwa resiliensi adalah suatu bentuk respon yang dilakukan secara sehat dan produktif ketika menghadapi kesulitan atau trauma untuk

kemudian mengatasi perubahan hidup pada level yang tinggi serta merupakan kapasitas individu dalam mengatasi, memperkuat diri dan melakukan perubahan sehubungan dengan ujian yang dialaminya (dalam Pratiwi, S.A., dkk. 2022).

Secara konseptual, resiliensi dapat didefinisikan sebagai kapasitas adaptif individu untuk bertahan, menyesuaikan diri, serta pulih secara efektif dari situasi yang penuh tekanan. Kemampuan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan psikologis, tetapi juga sebagai strategi proaktif yang memungkinkan individu, kelompok dan komunitas untuk mengatasi hambatan yang muncul dan tetap mempertahankan kesejahteraan mereka atau dengan kata lain resiliensi berperan dalam membentuk ketahanan kolektif. Resiliensi merupakan adaptasi yang positif tidak hanya dalam menghadapi stres dan trauma, lebih dari itu resiliensi berkaitan dengan bagaimana seseorang atau kelompok dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah, menemukan cara baru untuk mengatasi masalah dan terus maju meskipun mengalami kesulitan (Lubis, A.H., dkk. 2024).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa resiliensi dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan petani untuk mengatasi dan beradaptasi ketika menghadapi kejadian berat atau masalah-masalah yang terjadi dalam konflik agraria dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Resiliensi adalah pola pikir yang memungkinkan petani dapat beradaptasi untuk mencari pengalaman baru dalam situasi konflik.

2.4.1. Indikator Resiliensi

Resiliensi dalam pandangan beberapa ahli memiliki indikator yang berbeda-beda. Menurut Singh dan Yu (2010) terdapat empat indikator resiliensi yaitu (dalam Maryani, 2023) :

1. Ketahanan

Kemampuan individu untuk tetap tegar dan bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit atau penuh tekanan.

2. Optimisme

tetap percaya bahwa masa depan dapat lebih baik meskipun saat ini berada dalam kondisi sulit.

3. Identifikasi Solusi

Menggunakan keterampilan atau strategi yang efektif dalam mengatasi masalah.

4. Tujuan

Tujuan memberikan motivasi bagi seseorang untuk bertahan dan berusaha mencapai sesuatu yang bermakna dalam hidupnya.

Resiliensi menurut Revich dan Shatte (2002) memiliki tujuh indikator yaitu :

1. Regulasi Emosi

Regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk mempertahankan kestabilan emosional dalam situasi yang penuh tekanan.

2. Kontrol Impuls

Kemampuan individu untuk menahan emosi demi mengambil keputusan yang rasional. Individu dengan kontrol impuls yang rendah cenderung bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

3. Optimisme

Merupakan karakteristik individu yang memiliki keyakinan bahwa keadaan dapat berubah menjadi lebih baik.

4. Analisis Kausal

Pemahaman mengenai hubungan sebab-akibat dari masalah yang dihadapi.

5. Empati

merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menginterpretasikan kondisi psikologis serta emosional orang lain melalui petunjuk verbal maupun nonverbal.

6. *Self-Efficacy*

Mengacu pada keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan yang diinginkan.

7. Pencapaian

Berkaitan dengan individu yang dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Menurut Singh dan Yu (2010) yang telah dimodifikasi oleh Maryani (2023) terdapat tiga indikator resiliensi yaitu :

1. Adaptasi

Kemampuan beradaptasi merupakan keterampilan psikologis yang memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, menghadapi tantangan, serta mengelola tekanan secara efektif. Individu yang mampu beradaptasi cenderung lebih fleksibel dalam menyikapi situasi yang tidak terduga, lebih tangguh dalam menghadapi kegagalan, serta lebih percaya diri dalam mengambil keputusan sulit.

2. Optimisme

Optimisme merupakan sikap mental yang mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik, meskipun situasi yang dihadapi sulit atau penuh tantangan.

3. Tujuan.

Dengan memiliki tujuan yang jelas, individu dapat lebih termotivasi untuk menghadapi tantangan dengan penuh semangat.

Resiliensi menurut Larasati (2020) terdapat beberapa indikator, yaitu (dalam Yusrin, N., & Kurniaty, D. 2023) :

1. Ketahanan

Ketika individu dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan atau tantangan yang kompleks, mereka mengalami dampak

psikologis, emosional, maupun fisik. Individu yang memiliki ketahanan memungkinkan mereka untuk bertahan dan tetap berfungsi secara optimal meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan.

2. Adaptasi

Individu dapat melakukan penyesuaian dan dapat terbiasa dengan kondisi sulit maupun tantangan yang dihadapi dalam hidup.

3. Pemulihan

Pada saat ini individu ada di kondisi netral, ketika individu tidak merasa terganggu oleh situasi yang pernah dihadapi.

4. Pertumbuhan

Individu mampu berkembang menjadi lebih kuat dari pengalaman yang telah dihadapi selama berada dalam situasi sulit.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai indikator resiliensi, maka peneliti menyimpulkan dari beragam indikator yang dikemukakan oleh beberapa tokoh menghasilkan 3 (tiga) indikator resiliensi yaitu adaptasi, ketahanan, dan identifikasi solusi. Peneliti menyimpulkan bahwa tiga aspek tersebut sebagai indikator resiliensi karena ketiga aspek tersebut mencerminkan inti dari semua elemen indikator yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas.

2.4.2. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Resiliensi

Menurut Reisnick, dkk (2011) terdapat empat faktor yang dapat meningkatkan resiliensi pada individu atau kelompok, yaitu (dalam Maryani, 2023) :

1. *Self-Esteem*

Individu yang memiliki *self-esteem* dapat membantu dirinya dalam menghadapi kesengsaraan.

2. Dukungan Sosial

Ketika jaringan sosial yang ada di sekelilingnya memberikan *support* terhadap penyelesaian masalah atau proses bangkit kembali yang dilakukan oleh individu tersebut, maka jaringan tersebut disebut modal.

3. Spiritualitas

Dalam hal ini pandangan spiritual pada individu percaya bahwa tuhan adalah penolong terbaik dalam setiap kesengsaraan yang tengah di alaminya.

4. Kontrol Emosi

Elemen ini di butuhkan ketika individu menghadapi suatu situasi yang kritis dan dengan emosi positif dapat mengurangi stres secara lebih efektif.

2.5. Landasan Teori Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individual mengatasi masalah yang dihadapinya. Oleh karenanya diperlukan kebersamaan dan kerjasama untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Maka, sejatinya modal sosial merujuk pada kapasitas individu untuk memperoleh keuntungan dari hubungan sosial atau dalam kelompok sosial dan untuk mendapatkann keuntungan dari tindakan kolektif. Istilah modal sosial dikemukakan pertama kali oleh Lyda Judson Hanifan dalam buku berjudul *The Rural School Community Centre*. Dalam pandangannya Modal Sosial bukan merupakan kekayaan, uang, atau hal bersifat ekonomi, tetapi rasa tolong menolong, rasa simpati, kemauan untuk bekerjasama, dan hubungan sosial yang terjalin. Modal Sosial mengacu pada hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Modal Sosial berhubungan erat dengan moral dan rasa simpati (Santoso, T. 2020).

Dalam kamus Sosiologi kata kapital mengandung arti sumber-sumber yang dipergunakan untuk tujuan produktif, persediaan aset material suatu masyarakat atau kekayaan (modal). Sedangkan kata sosial mengandung arti sesuatu yang berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial. Jika digabungkan kata modal sosial maka mengandung arti aset-aset yang di miliki. Terdapat beberapa pengertian tentang modal sosial menurut para ahli (Rusnila, A.D., 2023)

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial, menurutnya modal sosial berfungsi untuk mereproduksi ketimpangan tetapi tidak sepenuhnya terlepas dari modal ekonomi dan budaya, yang tetap tidak dapat dipisahkan darinya. Kemudian James Coleman mendefinisikan modal secara mendasar bahwa konsep modal sosial merupakan sarana dalam menjelaskan bagaimana seseorang atau komunitas dalam melakukan kerjasama. Sedangkan Putnam menjelaskan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial yang berupa jaringan, norma, dan kepercayaan (John Field, 2003).

Terdapat beberapa pengertian tentang modal sosial menurut para ahli yang umumnya dirumuskan berdasarkan kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam aspek perkenomian, politik, atau sosial-budaya. Menurut pendapat Lesser modal sosial sangat penting bagi komunitas karena dengan adanya jaringan sosial yang lebih luas dapat mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas, adanya *power sharing*, memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas dan memungkinkan tindakan kolektif. Menurut Putnam, kerjasama mudah terjadi di dalam suatu komunitas menggunakan modal sosial dalam kehidupannya baik dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan antar warga. Rahmat Rais mengkaji tentang kehidupan politik di Italia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat madani (*civil community*) karena dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan dan terkoordinasi (Rusnila, A.D., 2023).

Pada prinsipnya, modal sosial berbicara mengenai ikatan atau kohesi sosial. Gagasan utama modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai bagi kohesi sosial karena mendorong iklim kerjasama untuk memperoleh manfaat. Relasi Sosial yang ada dapat dijadikan “Modal” untuk mendapatkan bukan hanya mengenai keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan sosial. Keuntungan sosial didapat dengan adanya modal relasi yang memfasilitasi aliran informasi mengenai sesuatu yang dibutuhkan, menjadi kekuatan dukungan atau memiliki “dampingan” dan sebagai tempat untuk berbagi kepentingan karena adanya rasa percaya. Modal Sosial menjadi penting untuk dimiliki seseorang atau kelompok karena Modal Sosial memungkinkan seseorang atau kelompok untuk menyelesaikan masalah secara kolektif. Yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah secara kolektif adalah Modal sosial memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dan membantu strategi tindakan kolektif yang efektif dan pada akhirnya membantu seseorang atau kelompok bertahan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi (Fathy, R. 2019).

2.5.1. Indikator Modal Sosial

Modal sosial sampai saat ini belum menemui penjelasan pasti mengenai indikator atau aspeknya, bahkan definisi mengenai modal sosial pun masih banyak menjadi perdebatan dikalangan para ahli. Menurut Putnam mengenai modal sosial memiliki tiga indikator, yaitu (Syahra, R., 2003) :

1. Jaringan

Adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara

sesama anggota masyarakat.

2. Norma

Bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan kolektif memperkuat norma-norma keharusan untuk saling membantu.

3. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) memiliki dampak positif dalam bermasyarakat.

Menurut James Coleman, modal sosial terdiri dari tiga indikator untuk dapat diamati, yaitu (Syahra, R. 2003) :

1. Kewajiban, Harapan, dan Kepercayaan

Jika seseorang telah menerima bantuan, ada ekspektasi bahwa mereka akan membalasnya di masa depan. Ini menciptakan kepercayaan dalam suatu komunitas atau kelompok sosial.

2. Arus Informasi

Modal sosial juga berfungsi melalui jaringan sosial yang menyediakan akses ke informasi penting.

3. Norma dan Sanksi

Norma dan sanksi sosial berfungsi untuk mengontrol perilaku dalam kelompok. Jika suatu kelompok memiliki norma yang kuat untuk mendukung tindakan tertentu (misalnya gotong royong), maka individu akan cenderung berperilaku sesuai dengan norma tersebut karena adanya sanksi sosial bagi mereka yang melanggar.

Menurut Laurence Prusak dan Don Cohen dalam bukunya *In Good Company: How Social Capital Make Organization Work* (2001) diterangkan bahwa modal sosial memiliki tiga indikator utama, yaitu (dalam Alfitri, 2023) :

1. *Trust* (kepercayaan)

Kepercayaan memungkinkan adanya komunikasi yang terbuka, mengurangi rasa curiga, serta mempercepat pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi, kepercayaan antara karyawan dan manajemen dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan loyalitas karyawan.

2. *Mutual Understanding* (saling pengertian)

Ini mengacu pada adanya kesepahaman antara individu dalam kelompok yang memungkinkan mereka bekerja dengan lebih harmonis. Ini berarti setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas tentang peran, tanggung jawab, dan tujuan bersama.

3. *Sharing Value* (nilai bersama)

Nilai bersama adalah prinsip, norma, atau keyakinan yang dipegang oleh anggota kelompok atau organisasi, yang membentuk identitas serta budaya organisasi. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan, serta menciptakan rasa kebersamaan di antara anggotanya.

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai modal sosial, peneliti menyimpulkan dari beragam indikator yang dikemukakan oleh beberapa tokoh menghasilkan 3 (tiga) indikator modal sosial yaitu jaringan, kepercayaan dan norma. Peneliti menyimpulkan demikian karena ketiga aspek tersebut saling berhubungan dalam membangun dan memperkuat modal sosial serta mencakup semua indikator dari berbagai pandangan.

2.5.2. Bentuk-Bentuk Modal Sosial

Putnam, memperkenalkan perbedaan antara dua bentuk dasar modal sosial, menurutnya modal sosial dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (Field, J. 2003) :

1. Modal Sosial Menjembatani (*inklusif*)

Modal sosial menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Modal sosial menjembatani baik digunakan untuk meraih hubungan-hubungan dengan eksternal dan persebaran informasi. Modal sosial menjembatani dapat memberikan akses orang pada kenalan lain yang menjadikan hubungan lebih luas. Putnam percaya bahwa modal sosial menjembatani baik untuk dijalani.

2. Modal Sosial Mengikat (*eksklusif*)

Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas. Modal sosial mengikat adalah modal sosial yang baik digunakan untuk menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas, sehingga menjadikannya perekat terkuat

dalam memelihara kesetiaan didalam kelompok dan memperkuat identitas spesifik. Bagi Putnam, modal sosial mengikat didasarkan pada kekeluargaan, teman dekat, kelompok akrab dan berorientasi pada orang terdekat. Putnam percaya bahwa modal sosial mengikat baik untuk disinggahi.

Sepandangan dengan Putnam mengenai pembagian modal sosial, Michael Woolcock membuat pemisahan modal sosial menjadi tiga, yaitu (Field, J. 2003) :

- 1) Modal Sosial Mengikat. Sama halnya dengan Putnam, modal sosial mengikat menurut Woolcock berarti ikatan antara orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman dekat, atau tetangga.
- 2) Modal Sosial Menjembatani. Demikian pula dengan modal sosial menjembatani yang berarti ikatan sosial ke ranah yang lebih luas, seperti teman jauh atau teman kerja dan lainnya.
- 3) Modal Sosial Menghubungkan. Menurut Woolcock ikatan sosial dapat diambil dari luar, yaitu berarti menjangkau orang-orang yang berada diluar komunitas sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya lebih daripada di dalam komunitas.

Woolcock menekankan arti penting dikaitkannya modal sosial pada indikator yang ke 3, yaitu ikatan yang menghubungkan ke luar komunitas. Karena dapat dimanfaatkan ketika internal komunitas mendapatkan guncangan, maka ikatan ini dapat dimanfaatkan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Dalam berbagai kajian literatur sangat banyak penelitian yang mengkaji konflik agraria, baik dengan pemerintah maupun dengan investor. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya dilakukan oleh Izudin, A. dan Suyanto (2019), Akbar, S.M., dkk. (2022), David, B.D. (2013), Maulana, I.R., dan Shohibuddin, M. (2022), dan Meiliani Puji Suharto (2019). Berikut penjabarannya:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Izudin, A. dan Suyanto (2019)	Gerakan Sosial Warga Parangkusumo pada Kasus Penggusuran Lahan untuk pembangunan <i>Geo Maritim Park</i>	Dalam bahasannya permasalahan yang menjadi titik sentral adalah bagaimana dinamika gerakan sosial warga yang terkena dampak penggusuran. Pada awalnya perjuangan warga berhasil mendapatkan ganti rugi atau relokasi lahan oleh pemerintah. Temuan dari penelitian ini adalah solidaritas warga seharusnya dapat merebut hak-hak mereka, namun karena kurang eratnya rasa solidaritas sosial dari warga yang terkena dampak hingga terpecah menjadi dua kubu membuat gerakan perlawanan berujung dengan kekalahan. Sampai saat ini, justru proses relokasi warga terdampak belum betul-betul berjalan dengan maksimal.
2	Akbar, S.M., dkk. (2022)	Dinamika Gerakan Perjuangan Agraria Suku Anak Dalam (SAD) Bathin Sembilan, Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari terhadap Industri Perkebunan Kelapa Sawit	PT. Berkat Sawat Utama (BSU) merampas lahan adat masyarakat Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Desa Bungku dengan legitimasi Negara. Dalam bahasannya penulis memaparkan dinamika pasang surut perjuangan Suku Anak Dalam dari awal terbentuknya gerakan sepanjang tahun 2016 - 2021. Pada hasilnya, meskipun Suku Anak Dalam telah melakukan berbagai pergerakan, pemerintah kerap kali memberikan janji manis yang tidak pernah direalisasikan, pada tahun 2021 Suku Anak Dalam memilih untuk <i>zero movement</i> .
3	Diwantoro, D.B (2023)	Upaya Pergerakan Organisasi Petani dalam Penyelesaian Konflik Agraria, studi kasus pada serikat tani korban gusuran lahan PT.	Dalam bahasannya konflik terjadi ketika PT BNIL melakukan penggusuran paksa pada warga desa Bujuk Agung untuk membangun perkebunan hibrida. Hasil temuan dari penelitian ini adalah korban gusuran bersatu membentuk organisasi dan melakukan

		BNIL di Desa Bujuk, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.	pergerakan sosial bersama LBH dan LSM baik melalui jalur advokasi maupun jalur hukum. Namun, terdapat hambatan berupa kurang eratnya solidaritas anggota dan pemerintah yang memiliki tendensi lebih terhadap korporasi membuat permasalahan ini belum menemui titik penyelesaian.
4	Ilham Rizkia M. dan Mohammad Shohibuddin (2022).	Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor.	Dalam penjabarannya, konflik agraria di Nanggung dipicu oleh adanya perbedaan persepsi mengenai status kepemilikan tanah, terutama tanah yang digunakan untuk pertanian dan pertambangan. Beberapa upaya dilakukan pemerintah sebagai respon untuk meredam ketegangan, seperti mediasi dan negosiasi. Dalam penelitian ini LSM dan kelompok tani memainkan peran penting dalam memperkuat posisi tawar petani lokal melalui advokasi, pendampingan hukum, dan kampanye publik. Mereka mencoba mengubah kebijakan pemerintah yang tidak pro-petani melalui berbagai strategi, termasuk dialog dan aksi protes
5	Meiliani Puji Suharto (2019).	Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.	Pada pembahasannya antara PT Hevindo dan masyarakat Nanggung memiliki perbedaan kepentingan, dimana PT Hevindo yang memiliki izin pengelolaan tanah perkebunan dan masyarakat lokal yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan penggunaan dan penguasaan tanah secara turun-temurun dan mengklaim bahwa tanah itu bagian dari tanah ulayat (tanah adat). Dalam permasalahan ini organisasi non-pemerintah (NGO) terlibat dalam membantu masyarakat dengan memberikan pendampingan hukum, advokasi, dan fasilitasi dialog antara masyarakat dan perusahaan.

Adapun kebaruan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pertama, penelitian ini memiliki fokus utama mengenai bagaimana modal sosial memberikan daya tahan (resiliensi) bagi petani Kota Baru dalam menghadapi konflik agraria. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kajian terdahulu mengenai konflik agraria belum pernah melihat dari aspek modal sosial yang dimiliki petani. Kebaruan tersebut menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan, sehingga dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur terkait konflik agraria. Kedua, lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tentu saja, konflik agraria berdasarkan beberapa literatur tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Upaya penyelesaian, dinamika, faktor penyebab konflik yang berbeda pula. Sehingga, lokasi penelitian menjadi perbedaan yang cukup signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.7. Kerangka Berpikir

Petani penggarap Kota Baru sejatinya sudah ada sejak tahun 1950-an yang merupakan transmigran Swakarsa dari daerah Jawa. Mereka melakukan penggarapan sejak tanah Kota Baru masih berstatus Kawasan Hutan Produksi Register 40 Gedong Wani. Sejarah tersebut menjadikan sebagian besar masyarakat petani penggarap yang ada di Kota Baru saat ini merupakan keturunan generasi kedua yang mewarisi tanah dan pemukiman dari orangtuanya di kawasan tersebut. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan kebijakan pembangunan Kota Baru untuk pusat pemerintahan Provinsi Lampung di wilayah tersebut dengan rencana penggunaan lahan seluas 1300 Hektar melalui Perda No. 12 Tahun 2009

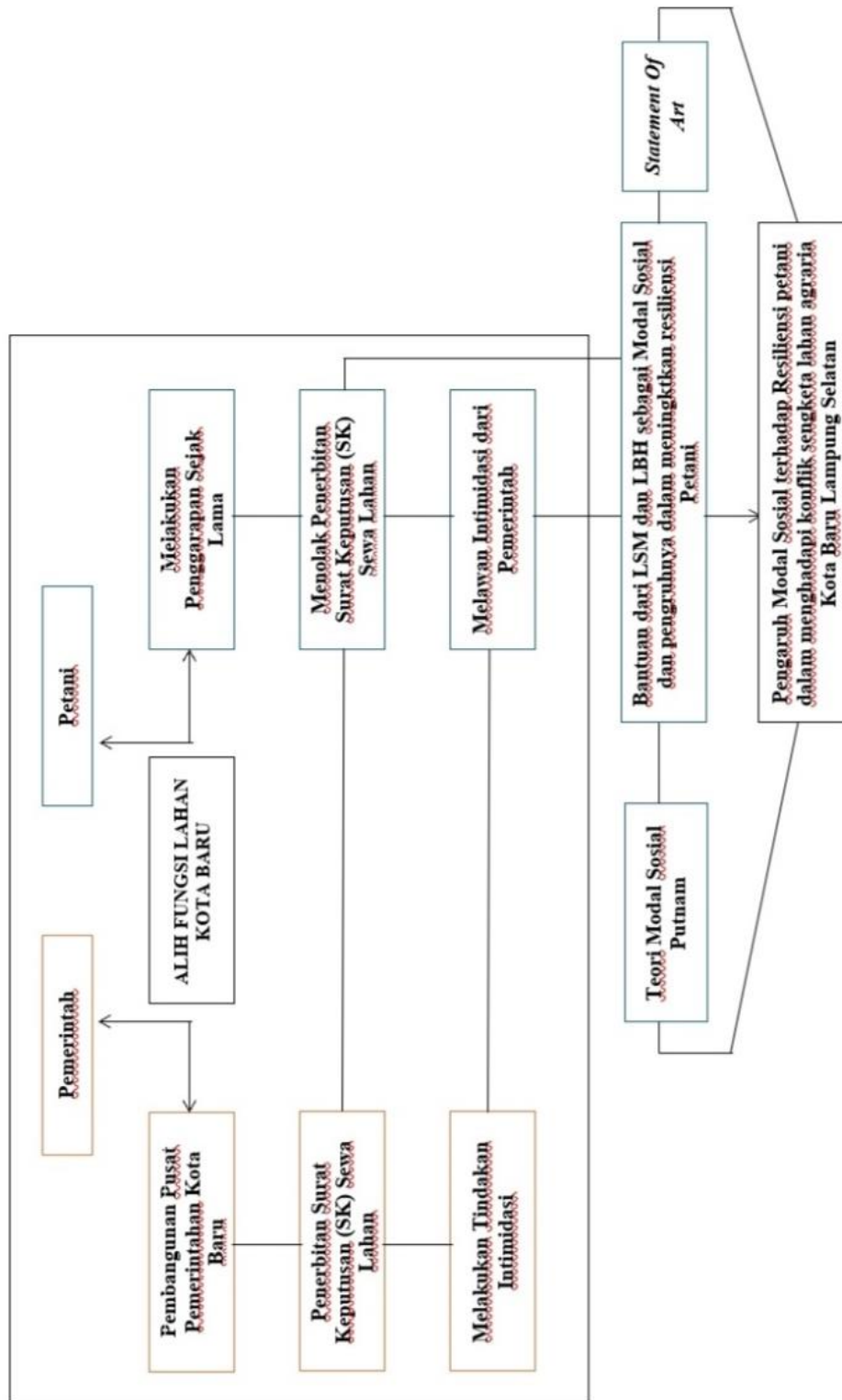
tentang RT/RW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029.

Pembangunan pusat pemerintahan Kota Baru itu justru kini mangkrak dan meninggalkan lahan yang seharusnya produktif menjadi lahan mati. Alih fungsi lahan yang tidak berkelanjutan ini menyebabkan petani tergusur dari lahan yang sudah digarap secara turun-temurun sejak lama, lebih daripada itu pemerintah Provinsi Lampung justru menetapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai sewa lahan bagi petani yang ingin melanjutkan penggarapan di tanah Kota Baru. Adanya kebijakan yang meminggirkan ini memaksa petani berjuang melakukan perlawanan untuk merebut kembali dan mempertahankan hak penggarapan atas tanah mereka. Konflik tersebut meningkat pada awal tahun 2024 ketika pemerintah secara paksa menggusur lahan yang digarap oleh petani.

Pada kondisi seperti ini, masyarakat petani tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri, oleh karenanya diperlukan modal sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Maka, sejatinya modal sosial merujuk pada kapasitas individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dari hubungan sosial atau dalam kelompok sosial untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan kolektif yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan adanya dukungan dari organisasi-organisasi yang dalam hal ini sebagai modal sosial, petani Kota Baru mendapatkan daya tahan (resiliensi) dan dukungan untuk melawan berbagai tekanan yang datang dari adanya konflik dengan pemerintah. Dengan demikian, resiliensi petani dalam menghadapi konflik agraria ini tidak hanya bergantung pada

kekuatan individu atau kelompok, tetapi juga pada kekuatan kolektif yang muncul dari adanya modal sosial petani sehingga memberikan daya bagi resiliensi petani Kota Baru. Berikut peneliti memberikan gambaran mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti (2024).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif berangkat dari filsafat konstruktivisme, yang memandang kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial. Metode kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengamatan mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik, dimana data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan yang kemudian disusun peneliti (tidak dituangkan dalam bentuk dan angka), sehingga hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Metode penelitian kualitatif memahami fenomena tertentu, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara menyeluruh. Penelitian ini berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu di dalam suatu konteks ilmiah (Mustafa, P.S., dkk. 2022).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan *riil* (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Fadli, M.R. 2021). Pemilihan metode penelitian kualitatif dilakukan karena dianggap sesuai dengan topik yang ingin diteliti. Tujuan utama penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data untuk dituangkan dalam bentuk deskriptif naratif dan kemudian dianalisis mendalam mengenai bagaimana pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan resiliensi petani dalam menghadapi konflik di Kota Baru Lampung Selatan tahun 2011 – 2025.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berperan dalam membatasi pengumpulan data, sehingga peneliti tetap terarah dan tidak mengalami perluasan pembahasan. Fokus peneliti pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Analisis modal sosial. Fokus ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk modal sosial yang ada antara petani dengan komunitas lain, seperti jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang mempengaruhi kerjasama dan solidaritas di antara mereka, sehingga menimbulkan bantuan dan tindakan kolektif.
- 2) Pengaruh modal sosial terhadap resiliensi petani. Fokus ini menganalisis bagaimana modal sosial yang dimiliki oleh petani,

seperti dukungan komunitas lain, akses informasi, dan lainnya mempengaruhi kemampuan petani untuk bertahan dalam menghadapi konflik lahan agraria.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan Kota Baru dengan melibatkan petani dari tiga desa sekitar, yaitu Desa Sindang Anom, Desa Purwotani, dan Desa Sinar Rejeki. Alasan peneliti melakukan penelitian dengan melibatkan petani dari tiga desa tersebut dikarenakan ketiga masyarakat desa ini merupakan petani penggarap di lahan sebelum dan sesudah adanya pembangunan Pusat Kota Baru yang mangkrak, yang kemudian menimbulkan konflik.

3.4. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (dalam Setiarsih, K.A. 2012) penentuan informan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kriteria peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini penentuan informan harus berkaitan dengan yang berkecimpung, berperan, atau mengikuti isu yang diteliti sehingga akan memudahkan peneliti menyelami permasalahan yang diteliti. Menurut pendapat Spradley bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut (dalam Sugiyono, 2020) :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih atau sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini melibatkan 10 (sepuluh) orang sebagai informan yang dianggap mengetahui, berkecimpung, atau aktif dalam upaya advokasi konflik agraria di Kota Baru untuk dapat dimintai informasi. Informan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama terdiri dari informan satu sampai lima, sedangkan informan pendukung terdiri dari informan enam sampai informan sepuluh.

Informan satu sampai lima merupakan petani penggarap di Kota Baru dan informan enam sampai sepuluh merupakan jaringan sosial diluar petani Kota Baru atau dalam hal ini aliansi petani. Peneliti membagi dua informan peneliti menjadi informan utama dan informan pendukung dengan alasan

agar dapat dengan lebih mudah menjabarkan hasil penelitian pada bagian hasil dan pembahasan, selain itu alasan peneliti memisahkan informan menjadi dua bagian adalah agar tidak adanya pengulangan informasi dalam penulisan. Adapun profil dari informan tersebut, sebagai berikut.:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat	Pekerjaan
Informan Utama				
1	Uun Irawati	47	Sindang Anom	Petani
2	Maryono	54	Purwotani	Petani
3	Jamari	52	Sinar Rejeki	Petani
4	Ujang Sarip	55	Purwotani	Petani
5	Hemin	38	Sindang Anom	Petani
Informan Pendukung				
6	Prabowo Pamungkas	28	Jl. Sam Ratulangi Gg. Mawar 1 No. 7, Gedong Air.	Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung
7	Irfan Tri Musri	32	Jl. Pramuka No. 56, Langkapura.	Direktur Eksekutif WALHI Lampung
8	Amnesti Amalia	30	Jl. Sebiay 2, Hajimena.	Koordinator Program SP Sebay Lampung
9	Fuad Abdulghani	38	Sukadanaham	Akademisi
10	Annisa Despita Sari	22	Jl. Indra Bangsawan	Mahasiswa

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024.

Berdasarkan data tabel informan diatas, peneliti akan mendeskripsikan secara rinci mengenai profil informan. Hal ini dirasa perlu dilakukan agar memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai karakteristik informan sekaligus mempertegas bahwa informan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk dijadikan subjek penelitian.

Informan 1

Informan pertama dalam penelitian ini adalah seorang perempuan bernama Uun Irawati, beliau berusia 47 tahun. Informan yang kerap di sapa dengan sebutan Bunda Tini merupakan salah satu petani Kota Baru sejak tahun 2010 setelah diwariskan lahan di Kota Baru oleh ayahnya, sejak saat itu informan mengalami konflik agraria dengan Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini dan mendapatkan bentuk kriminalisasi pada awal tahun 2024. Informan pertama ini berasal dari Desa Sindang Anom, Lampung Timur yang menggarap di lahan Kota Baru. Beliau menjadi saksi dinamika konflik agraria di Kota Baru. Bunda Tini secara aktif ikut serta dalam berbagai aksi penolakan, mediasi, diskusi, dan konsolidasi konflik agraria di Kota Baru. Hal inilah yang membuat peneliti menjadikan Bunda Tini sebagai informan penelitian yang relevan dan kredibel.

Informan 2

Informan kedua adalah seorang laki-laki bernama Maryono, beliau berusia 54 tahun. Informan yang kerap disapa dengan Pak Maryono juga merupakan salah satu petani Kota Baru sejak tahun 2010. Informan kedua ini berasal dari Desa Purwotani Lampung Selatan yang menggarap di lahan Kota Baru. Informan kedua juga mengalami konflik dengan Pemerintah Provinsi

Lampung yang bermula dari sengketa lahan garapan yang diklaim sepihak oleh pemerintah sebagai area untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kota Baru. Beliau merupakan salah satu petani yang sangat aktif ikut serta dalam berbagai aksi dan diskusi. Hal inilah yang membuat peneliti menjadikan Pak Maryono sebagai informan penelitian yang relevan dan kredibel.

Informan 3

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki bernama Jamari, beliau berusia 52 tahun. Informan yang kerap disapa dengan sebutan Pak Jamari juga merupakan salah satu petani Kota Baru sejak tahun 2010. Informan ketiga berasal dari Desa Sinar Rejeki, Lampung Selatan yang menggarap di lahan Kota Baru. Beliau juga terlibat dalam konflik agraria yang bermula dari sengketa lahan garapan yang diklaim sepihak oleh pemerintah sebagai area untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kota Baru. Informan ketiga ini dikenal aktif dalam aksi-aksi protes, mediasi dengan pihak pemerintah, dan konsolidasi dengan publik sejak tahun 2011 hingga saat ini. Dengan begitu Pak Jamari memiliki perspektif mendalam terkait dinamika konflik agraria di Kota Baru. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menjadikan Pak Jamari sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.

Informan 4

Informan keempat dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki bernama Ujang Sarip, beliau berusia 55 tahun. Informan yang kerap disapa dengan sebutan Pak Ujang juga merupakan salah satu petani Kota Baru. Informan ketiga berasal dari Desa Purwotani, Lampung Selatan yang menggarap di

lahan Kota Baru. Beliau juga terlibat dalam konflik agraria yang bermula dari sengketa lahan garapan yang diklaim oleh pemerintah sebagai area untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kota Baru pada tahun 2009. Informan keempat ini dikenal aktif bersama petani Kota Baru lainnya saat aksi penolakan. Terakhir kali beliau ikut pada aksi petani Kota Baru di Polres Lampung Selatan, Kalianda dalam menuntut kepastian hukum pengrusakan lahan oleh BPKAD. Dengan begitu Pak Ujang memiliki perjalanan panjang dalam keterlibatan pada konflik agraria Kota Baru. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menjadikan Pak Ujang sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.

Informan 5

Informan kelima dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki bernama Hemin, beliau berusia 38 tahun. Informan yang kerap disapa dengan sebutan Mas Hemin juga merupakan salah satu petani Kota Baru. Informan kelima berasal dari Desa Sindang Anom, Lampung Timur yang menggarap di lahan Kota Baru. Informan kelima ini dikenal aktif bersama petani Kota Baru lainnya saat aksi penolakan. Beliau juga sangat paham mengenai luasan lahan Kota Baru yang terbagi-bagi atas dasar hibah dari Gubernur Provinsi Lampung pada saat itu. Dengan begitu Mas Hemin memiliki pengetahuan lebih pada konflik agraria Kota Baru. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menjadikan Mas Hemin sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.

Informan 6

Informan keenam dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki bernama Irfan Tri Musri, beliau berusia 32 tahun. Informan keempat merupakan seorang Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung. Informan keempat telah menyuarakan permasalahan ini selama 14 tahun dan secara aktif terlibat langsung dalam berbagai upaya advokasi, mediasi, dan konsolidasi terkait konflik agraria yang melibatkan petani Kota Baru. Tidak hanya itu, informan keempat juga kerap memberikan arahan, masukan, bahkan membuka ruang diskusi dengan petani Kota Baru dan menjangkau lembaga sosial, akademisi serta masyarakat luas untuk peduli terhadap isu lingkungan dan agraria. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menjadikan Bang Irfan Tri Musri sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.

Informan 7

Informan ketujuh dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki bernama Bowo, beliau berusia 28 tahun. Informan ketujuh ini merupakan seorang Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung. Informan terlibat dalam memberikan bantuan hukum kepada petani Kota Baru yang mengalami konflik agraria dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Tidak hanya bantuan hukum saja, beliau juga selalu mendampingi petani Kota Baru dan terlibat langsung dalam berbagai upaya advokasi, mediasi, dan konsolidasi, bahkan informan kelima juga kerap memberikan edukasi hukum kepada petani Kota Baru melalui pelatihan dan diskusi guna meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak agraria serta cara melindungi diri secara hukum.

Informan 8

Informan kedelapan dalam penelitian ini adalah seorang perempuan bernama Amnesti Amalia, seorang aktivis muda berusia 30 tahun. Beliau merupakan Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebay Lampung. Beliau berfokus pada isu-isu keadilan gender termasuk dampak konflik terhadap petani Kota Baru, khususnya perempuan. Dukungannya dapat terlihat dari perannya yang aktif dalam ikut serta pada aksi-aksi demonstrasi, advokasi, dan konsolidasi dengan memberikan suara, ide, bahkan strategi aksi untuk memajukan hak atas tanah dan penghidupan petani Kota Baru. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menjadikan Amnesti sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.

Informan 9

Informan kesembilan dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki bernama Fuad Abdulghani, beliau berusia 38 tahun. Beliau merupakan seorang akademisi yang aktif memberikan analisis kritis terhadap konflik agraria Kota Baru. Analisisnya memberikan kontribusi sebagai pen jembatan antara dunia akademik dan gerakan masyarakat melalui diskusi-diskusi dan konsolidasi dengan berbagai pihak seperti petani, lembaga masyarakat, organisasi, civitas akademika, dan sebagainya. Melalui perannya, beliau memberikan wawasan untuk mendorong perjuangan petani Kota Baru dan mendorong keterlibatan civitas akademika lainnya untuk turut berkontribusi berupaya menghentikan kriminalisasi terhadap petani Kota Baru.

Informan 10

Informan kesepuluh dalam penelitian ini adalah seorang perempuan bernama Puja. Beliau merupakan mahasiswa sekaligus aktivis muda berusia 22 tahun. Beliau tergabung dalam lembaga masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung sejak tahun 2022. Keterlibatan beliau dalam lembaga masyarakat inilah yang membuka jalannya untuk terlibat aktif dalam gerakan sosial, terutama pada isu lingkungan hidup termasuk konflik agraria Kota Baru. Beliau kerap ikut serta pada aksi demonstrasi, kampanye media, dan diskusi publik dalam konflik agraria Kota Baru ini. Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti menjadikannya sebagai informan yang relevan dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (dalam Setiarsih, K.A. 2012) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dilakukannya pengumpulan data untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan. Dalam proses pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi:

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memahami kondisi atau bukti nyata yang dialami oleh petani dalam menghadapi tekanan struktural serta melihat secara langsung bagaimana petani memanfaatkan modal sosialnya untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumetal dari seseorang.

3.6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yang kemudian diakhiri dengan penyimpulan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data, yaitu (Zulfirman, R. 2022) :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis berdasarkan bukti yang didapatkan pada penelitian di lapangan. Kesimpulan yang diambil pada awalnya bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan penemuan data lebih lanjut. Kesimpulan tersebut menjadi kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan yang akurat dan valid menjadi tujuan utama dalam tahap verifikasi.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Hasil riset kualitatif lebih relatif menimbulkan keraguan disebabkan karena adanya ketidak jelasan dalam hal analisis pengukuran. Sehingga, untuk menjawab keraguan tersebut dan memastikan kebenaran hasil dari perisetan yang telah dilakukan, maka seorang peneliti harus terlebih dahulu memahami kriteria kesahihan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai cara untuk menghilangkan keraguan dari hasil penelitian

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam hasil penelitian dan dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan. Melalui teknik triangulasi sumber, peneliti berusaha membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan penelitian sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu informan dengan informan yang lain (Nurfajriani, W.F., dkk. 2024).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Deskripsi Umum Kabupaten Lampung Selatan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° – $105^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15'$ – 6° Lintang Selatan. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 km², dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda. Saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 932.552 jiwa, memiliki luas daratan 2.109,74 km² yang terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Lampung Selatan memiliki suhu tertinggi dan terendah antara $21,20^{\circ}\text{C}$ dan $34,10^{\circ}\text{C}$. Batas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

4.2. Deskripsi Umum Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Jati Agung terletak di paling Utara Kabupaten Lampung Selatan dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.138/173/POUD tanggal 17 Juni 1999 perihal-perihal petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1999 dan No. 81 Tahun 1999. Meresmikan Kecamatan Jati Agung dengan Ibu Kota Marga Agung yang meliputi 21 Desa yaitu Way Huwi, Jati Mulyo, Banjar Agung, Gedung Harapan, Gedung Agung, Margomulyo, Sidodadi Asri, Purwotani, Sumber Jaya, Mergodadi, Margo Lestari, Marga Agung, Marga Kaya, Sinar Rejeki, Sidoharjo, Rejomulyo, Karang Anyar, Fajar Baru, Karang Sari, Karang Rejo, dan Margorejo. Secara topografis wilayah Kecamatan Jati Agung sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut kurang dari 110 meter. Batas geografis Kecamatan Jati Agung dengan wilayah lain adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.

4.3. Deskripsi Umum Desa Sindang Anom

a. Sejarah Desa

Pada jaman penjajahan Belanda tahun 1923 telah dibentuk *Marga Indeeling Residentie Lampoeng* yang terdiri dari 62 Marga. Wilayah masing-masing marga merupakan wilayah adat dan hak milik adat bagi masyarakat adat setempat. *Mergo Gedung Wani* merupakan salah satu marga yang ada ketika itu, namun dalam perkembangan pemerintahan selanjutnya pada tahun 1934-1935 berdasarkan kesepakatan para Penyimbang Adat Buwai Selaga, Beliu, dan Nuban sepakat untuk merubah nama *Mergo Gedung Wani* menjadi *Mergo Tigo*. *Mergo* suatu pemerintahan terdiri dari beberapa kampung. Setiap kampung dipimpin oleh Penyimbang Adat dan Kepala Kampung, Pemerintahan di tingkat *Mergo* dipilih oleh *Pesirah* sebagai pemimpin.

Pesirah pertama pada waktu itu adalah Pengiran Puccak Mergo. Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kampung Gedung Wani. Pada masa pemerintahan Pengiran Puccak Mergo, Pemerintah Belanda meminta sebagian wilayah *Gedong Wani* untuk dijadikan wilayah Hutan Produksi. Berdasarkan kesepakatan para Penyimbang Adat, permintaan tersebut disetujui. Selain itu, Pemerintah Belanda juga meminta Wilayah Mergo Batang Hari untuk dijadikan sebagai lokasi pemukiman Kolonialisasi. Berdasarkan kesepakatan para Penyimbang Adat, permintaan tersebut disepakati. Pada tahun 1935 daerah tersebut dihuni oleh pendatang Kolonialisasi dari Pulau Jawa. Hal tersebut mengakibatkan Trasmigrasi Swakarsa secara spontan berdatangan ke daerah kawasan Hutan

Produksi. Transmigrasi Swakarsa tersebut berasal dari Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan sekitarnya. Sejak tahun 1940 terjadi perambahan Hutan Produksi.

Desa Sindang Anom dihuni sejak tahun 1935 dengan nama Kampung Palembang, karena pada waktu itu yang pertama merintis dan membuka hutan adalah pendatang dari Sumatera Selatan. Pada tahun 1940 berdatangan Transmigrasi Swakarsa dari Daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendatang tersebut kemudian mengangkat Kepala Kampung bernama Jaroh Salim dari daerah Banten. Setelah Jaroh Salim meninggal, diangkat kembali Kepala Kampung bernama Makmur pada tahun 1950. Pada masa pemerintahan beliau, Kampung Palembang diganti dengan nama Desa Sindang Anom. Secara administratif, Desa Sindang Anom ditetapkan sebagai desa definitif (memenuhi syarat) pada 05 Desember 1955.

b. Kondisi Geografis Desa

Gambar 2. Peta Wilayah Desa Sindang Anom



Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

Secara administratif, Desa Sindang Anom memiliki luas wilayah 1.998 Ha yang terdiri dari 16 dusun dan 35 Rukun Tetangga (RT). Secara geografis, Desa Sindang Anom terletak 46 Km dari pusat kota pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Secara topografi, wilayah Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian tempat 50 mdpl diatas permukaan laut.

Desa Sindang Anom memiliki tanah yang subur untuk pertanian dengan jenis tanah sebagian besar merupakan Podsolik M.K. Secara Klimatologis Desa Sindang Anom memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara berkisar antara 30°C sampai dengan 32°C. Batas-batas Desa Sindang Anom :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Marga Tiga
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Agung
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- d) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan

c. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah dapat menunjukkan tingkat kepadatan, distribusi, serta pertumbuhan populasi. Data mengenai jumlah penduduk peneliti dapatkan melalui profil Desa. Berikut adalah data mengenai jumlah penduduk Desa Sindang Anom:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sindang Anom

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	3.709 Jiwa
2	Perempuan	3.428 Jiwa
3	Kepala Keluarga (KK)	2.319 KK
Jumlah Penduduk		7.157 Jiwa

Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sindang Anom menggambarkan pola pendidikan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan data yang ada, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat pendidikan penduduk:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sindang Anom

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	482 Orang
2	SLTP/MTs	287 Orang
3	SLTA/MA	395 Orang
4	S2/S1/Diploma	29 Orang

Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

d. Kondisi Sosial Budaya

1. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana desa mencakup berbagai fasilitas seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, atau fasilitas umum lainnya. Kondisi sarana dan prasarana Desa Sindang Anom dalam data sebagai berikut :

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Desa Sindang Anom

No	Sarana	Unit
1	TK/PAUD	6
2	SD/MI	2
3	SLTP/MTs	2
4	Masjid/Musholla	30
5	Gereja	2
6	Pura	1
7	Lapangan Sepak Bola	2
8	Lapangan Bola Volly	4
9	Lapangan Badminton	2

Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Untuk memahami lebih lanjut apa saja lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sindang Anom, berikut adalah data mengenai jumlah serta jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sindang Anom :

Tabel 6. Lembaga Kemasyarakatan Desa Sindang Anom

No	Lembaga	Jumlah
1	PEMDES	21 Orang
2	BPD	9 Orang
3	LPM	30 Orang
4	PKK	26 Orang
5	GAPOKTAN	14 Kelompok
6	KARANG TARUNA	1 Kelompok
7	POSKEDES	2 Orang

Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

e. Kondisi Ekonomi

1. Pola Penggunaan Tanah

Sebagian besar lahan digunakan untuk ladang dan perkebunan.

Berikut penjelasan lebih lanjut :

Tabel 7. Penggunaan Lahan Desa Sindang Anom

No	Lahan	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	270,75 Ha
2	Lahan Ladang	664,25 Ha
3	Lahan Perkebunan	704,50 Ha
4	Lahan Pemukiman	358,8 Ha

Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu aspek penting dalam analisis demografi, karena mencerminkan struktur ekonomi serta tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Berikut adalah data mengenai mata pencaharian penduduk di Desa Sindang Anom :

Tabel 8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sindang Anom

No	Jenis Pekerjaan	Luas (Ha)
1	PNS	10
2	Guru Swasta	20
3	Bidan/Perawat/Praktek	1
4	Karyawan Swasta	240
5	Pedagang	195
6	Petani	647
7	Tukang	43
8	Sopir	33
9	Buruh	300

Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

f. Kondisi Pemerintahan

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sindang Anom memiliki 14 dusun yang terbagi ke dalam 34 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pembagian wilayah di Desa Sindang Anom:

Tabel 9. Pembagian Wilayah Desa Sindang Anom

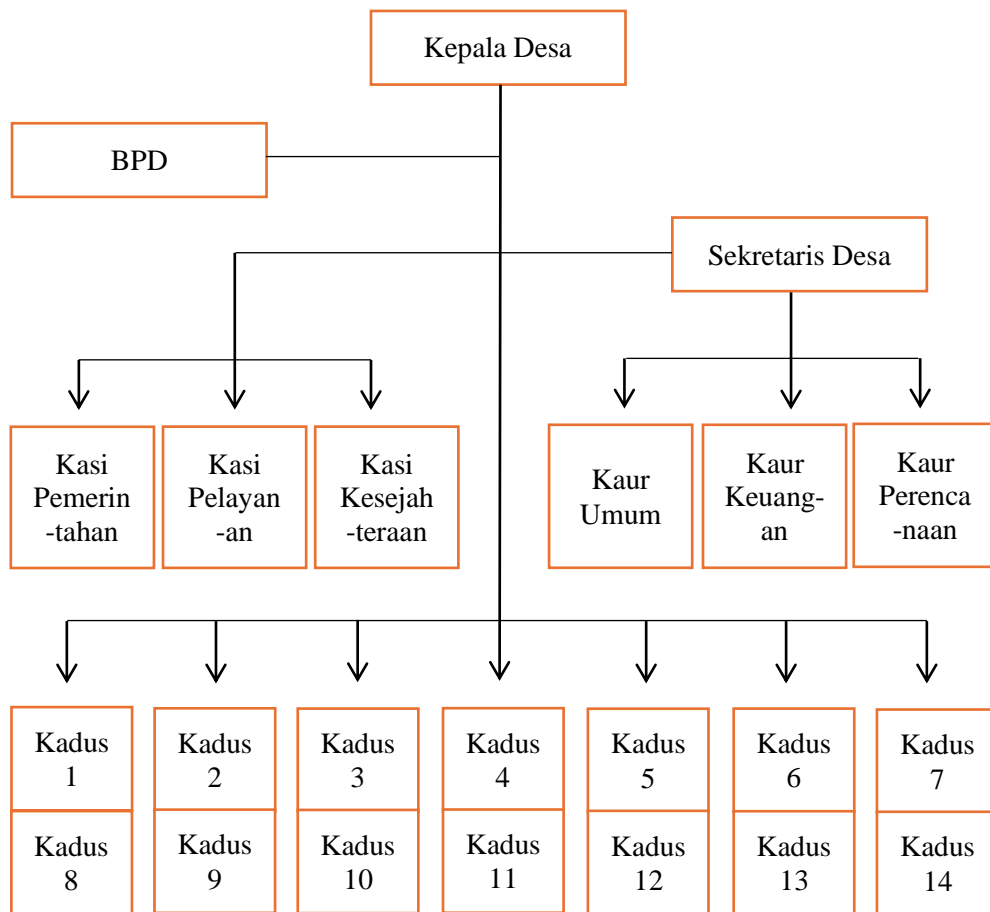
No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun 1	2
2	Dusun 2	3
3	Dusun 3	2
4	Dusun 4	2
5	Dusun 5	2
6	Dusun 6	3
7	Dusun 7	2
8	Dusun 8	2
9	Dusun 9	2
10	Dusun 10	4
11	Dusun 11	4
12	Dusun 12	2
13	Dusun 13	2
14	Dusun 14	2

Sumber : Profil Desa Sindang Anom, 2024.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa elemen yang saling mendukung untuk menjalankan berbagai fungsi administratif dan pelayanan publik. Berikut penjelasan struktur pemerintahan Desa Sindang Anom secara umum :

Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Sindang Anom



Sumber : Profil Desa Sindang, 2024.

4.4. Deskripsi Umum Desa Sinar Rejeki

a. Sejarah Desa

Desa Sinar Rejeki dibentuk pada tahun 1966 yang awal mulanya bernama “Tavip”. Status Tavip pada tahun 1966 adalah calon kampung atau calon desa yang merupakan “Susukan” yang dikepalai oleh seorang kepala Susukan yaitu Cik Din. Susukan Tavip tersebut apabila ditinjau dari letaknya termasuk dalam area atau kawasan hutan produksi Gedung Wani Register 40 dengan luas 482 Ha. Adapun jumlah penduduk Susukan Tavip pada waktu itu berjumlah 423 jiwa dengan jumlah KK 152 KK.

Pada tahun 1969 diadakan pembukuan hutang, Susukan Tavip bertambah luas wilayahnya seluas 651 Ha. Kepala Susukan Tavip kemudian diganti dengan Hasan Raden Putra. Semakin bertambahnya penduduk, maka Susukan Tavip bertambah arealnya lagi seluas 370 Ha. Pada tahun 1975 dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor:1691/1/3/75 tanggal 25 November 1975, Susukan Tavip telah resmi menjadi desa definitive dengan nama Desa Sinar Rejeki.

b. Kondisi Geografis

Gambar 4. Peta Desa Sinar Rejeki



Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

Desa Sinar Rejeki termasuk kawasan dataran rendah dengan ketinggian 50 mdpl dari permukaan laut. Desa Sinar Rejeki memiliki luas wilayah 2.210 Ha. 1/3 bagian dari luas wilayah digunakan sebagai lahan sawah dan 2/3 bagiannya digunakan sebagai daerah permukiman. Batas-batas wilayah Desa Sinar Rejeki sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidoharjo
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Jaya
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwotani

c. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Desa Sinar Rejeki memiliki total jumlah penduduk sebanyak 8.383 jiwa, yang terdiri dari 4.277 laki-laki dan 4.106 perempuan. Selain

itu, terdapat 2.594 kepala keluarga (KK) yang tercatat di desa ini.

Berikut rinciannya :

Tabel 10. Jumlah Penduduk Desa Sinar Rejeki

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	4.277 Jiwa
2	Perempuan	4.106 Jiwa
3	Kepala Keluarga (KK)	2.594 KK
Jumlah Penduduk		8.383 Jiwa

Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Berikut data tingkat pendidikan masyarakat Desa Sinar Rejeki :

Tabel 11. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sinar Rejeki

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP/MTs	1.931 Orang
2	SLTA/MA	954 Orang
3	Diploma ½	18 Orang
4	Diploma 3	16 Orang
5	S1	89 Orang
6	S2	3 Orang
7	Belum/Tidak Sekolah	2.375 Orang
8	Belum Tamat SD	617 Orang
9	Tamat SD	2.380 Orang

Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

d. Kondisi Sosial Budaya

1. Lembaga Kemasyarakatan

Berikut data lembaga kemasyarakatan Desa Sinar Rejeki :

Tabel 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa Sinar Rejeki

No	Lembaga	Anggota/Kelompok
1	POSYANDU	26 Orang
2	BPD	9 Orang
3	LPM	2 Orang
4	PKK	10 Orang
5	GAPOKTAN	1 Kelompok
6	Karang Taruna	9 Orang
7	BUMDES	3 Orang
8	Kelompok Tani	33 Kelompok
9	Kelompok Ternak	1 Kelompok
10	PPS	6 Orang

Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Desa Sinar Rejeki sebagai berikut :

Tabel 13. Sarana dan Prasarana Desa Sinar Rejeki

No	Sarana	Unit
1	TK/PAUD	5
2	SD/ MI	5
3	SMP/ MTS	3
4	SMA/SMK/MA	2
5	Puskesmas	1
6	Masjid dan Musholla	42

Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

e. Kondisi Ekonomi

1. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Sinar Rejeki didominasi dengan ladang.

Berikut penjelasannya :

Tabel 14. Penggunaan Lahan Desa Sinar Rejeki

No	Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah Tadah Hujan	210,0 Ha
2	Tegalan/Ladang	1.392,8 Ha
3	Pemukiman Penduduk	250,0 Ha
4	Lainnya	57,2 Ha
Jumlah		2.210 Ha

Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Masyarakat Desa Sinar Rejeki sebagian besar bekerja sebagai petani dan pekebun. Berikut adalah data mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Sinar Rejeki :

Tabel 15. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sinar Rejeki

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	15
2	TNI-POLRI	4
3	Nelayan	1
4	Pedagang	124
5	Petani/Pekebun	1.832
6	Buruh	301
7	Sopir	19
8	Mekanik dan Konstruksi	21
9	Industri	2
10	Karyawan Swasta	83
11	Karyawan Honorer	6
12	Wiraswasta	495
13	IRT	1.763
14	ART	2
15	Tukang Sol Sepatu	1
16	Pandai Besi	2
17	Penjahit	1
18	Penata Rias	1

19	Ustadz	4
20	Tenaga Pendidik	37
21	Bidan, Perawat, Apoteker	11
22	Perangkat Desa	13
23	Pensiunan	4
24	Pelajar/Mahasiswa	305
25	Tidak Bekerja	3.335

Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

f. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Berikut rincian pembagian wilayah Desa Sinar Rejeki :

Tabel 16. Pembagian Wilayah Des Sinar Rejeki

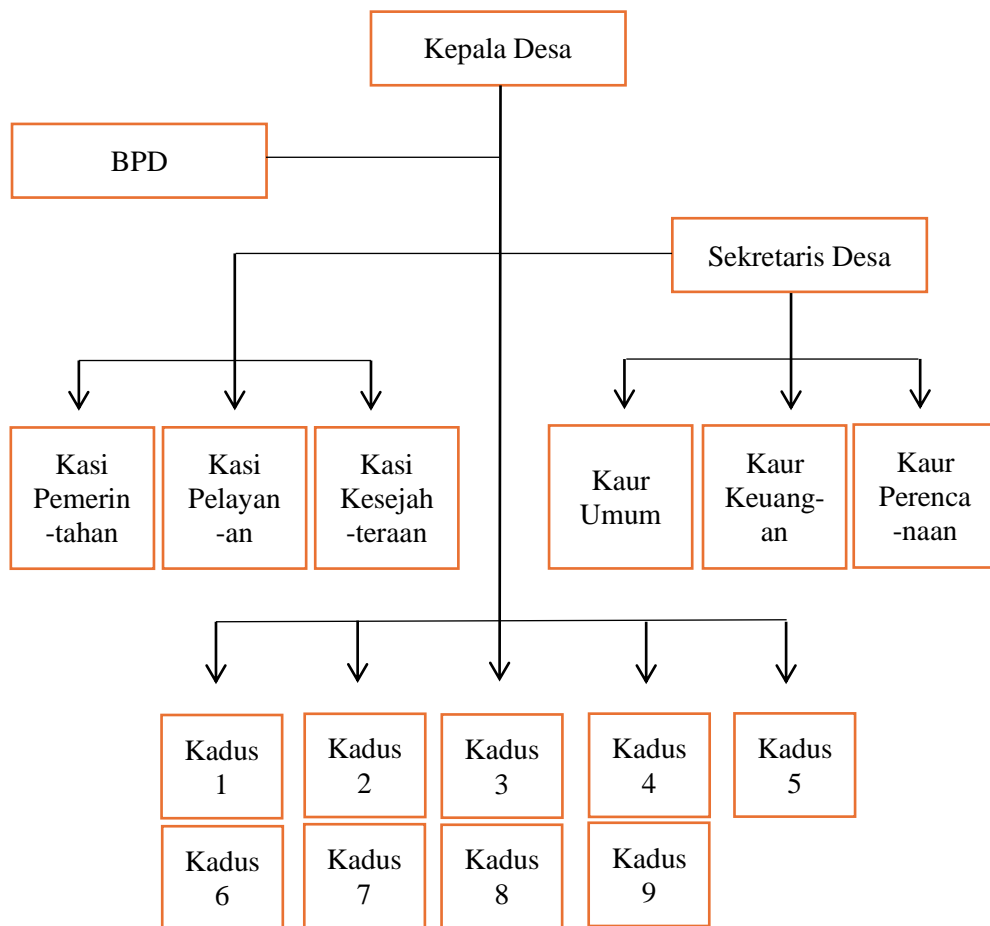
No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun Tri Rejo	6
2	Dusun Pelita Jaya	6
3	Dusun Srimukti	5
4	Dusun Sukamaju A	7
5	Dusun Sukamaju B	6
6	Dusun Sukamaju C	5
7	Dusun Sumber Bakti A	6
8	Dusun Sumber Bakti B	5
9	Dusun Beringin Jaya	3

Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa elemen yang saling mendukung untuk menjalankan berbagai fungsi administratif dan pelayanan publik. Berikut penjelasan struktur pemerintahan Desa Purwotani secara umum

Gambar 5. Struktur Pemerintahan Desa Sinar Rejeki



Sumber : Profil Desa Sinar Rejeki, 2024.

4.5. Deskripsi Umum Desa Purwotani

a. Sejarah Desa

Pada tahun 1940, terjadi Transmigrasi Swakarsa dari Daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan, sehingga masyarakat transmigran membuka lahan Kawasan Hutan untuk pemukiman dan pertanian atau perkebunan seperti kopi, cengkeh, dan lada. Masyarakat pada saat itu membuka lahan secara berkelompok menurut asal sukunya, maka terbentuklah suatu pemukiman (Talang/Umbul) yang diberi nama Talang Jued, Talang Acam, Talang Sohar, dan Talang Langgar.

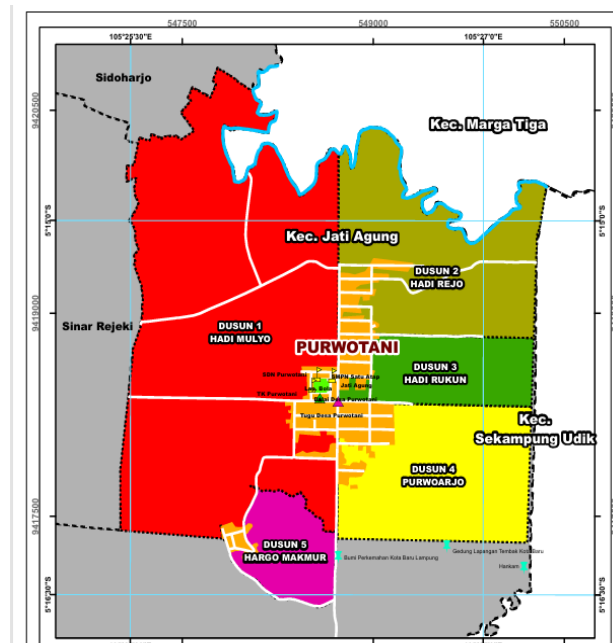
Pada Tahun 1955 Desa Sindang Anom diresmikan secara administrative dan Talang/Umbul tersebut secara administrasi masuk menjadi bagian dari wilayah Desa Sindang Anom. Pada tahun 1971-1972, Perusahaan Jepang yang bernama PT. Mitsugoro IV mendirikan perusahaannya dan menggunakan sebagian wilayah Sindang Anom. Pada Tahun 1980, perusahaan tersebut tidak berjalan lagi (bangkrut). Pada tahun 1984 karyawan PT. Mitsugoro IV di transmigrasikan ke wilayah areal Mitsugoro IV dengan nama Transmigrasi Lokal. Transmigrasi tersebut secara resmi disahkan oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia sebanyak 74 KK.

Pada tahun 1986, Departemen Transmigrasi Lembaga Pengkajian Transmigrasi Unit Jabung mengadakan transmigrasi pemekaran di wilayah tersebut dengan luas 250 Ha untuk pemukiman dan peladangan.

Pada tahun 1988 seluruh wilayah transmigrasi tersebut mengumpulkan masing-masing kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penduduk setempat untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan pembentukan/pengusulan desa sendiri. Maka dari hasil pertemuan tersebut diseakati pengusulan pembentukan desa dengan Nama Desa Persiapan Purwotani yang terdiri dari wilayah transmigrasi Lokal, transmigrasi pemekaran, Talang Jued, Talang Sohar, Talang Langgar, dan Talang Acam. Desa Persiapan Purwotani menjadi Desa Definitif pada tahun 1992 dengan SK Bupati Nomor:G/369/B.II/HK/1993 yang masuk kedalam Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 2.002 Ha.

b. Kondisi Geografis

Gambar 6. Peta Wilayah Desa Purwotani



Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

Desa Purwotani memiliki luas wilayah seluas 2.002 Ha dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sinar Rejeki
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sindang Anom
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindang Anom

c. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Desa Purwotani berdasarkan sensus penduduk tahun 2024 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.679 jiwa.

Tabel 17. Jumlah Penduduk Desa Purwotani

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	1.394 Jiwa
2	Perempuan	1.285 Jiwa
3	Kepala Keluarga (KK)	780 KK
Jumlah Penduduk		2.679 Jiwa

Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sindang Anom menggambarkan pola pendidikan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan data yang ada, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat pendidikan penduduk:

Tabel 18. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Purwotani

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	482 Orang
2	SLTP/MTs	287 Orang
3	SLTA/MA	395 Orang
4	S2/S1/Diploma	29 Orang
5	Belum/Tidak Sekolah	180 Orang
6	Buta Huruf	8 Orang

Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

d. Kondisi Sosial Budaya

1. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana desa merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup penduduk. Berikut adalah data mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Purwotani :

Tabel 19. Sarana dan Prasarana Desa Purwotani

No	Sarana Prasarana	Unit
1	TK/PAUD	1
2	SD	1
3	SMP	1
4	Masjid	3
5	Musholla	8

Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan juga menjadi wadah bagi warga untuk berkolaborasi. Berikut adalah data mengenai lembaga kemasyarakatan yang terdapat di wilayah yang diteliti:

Tabel 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa Purwotani

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	LPM	1
2	Pengajian	9
3	Arisan	5
4	Simpan Pinjam Perempuan	7
5	GAPOKTAN	10
6	Karang Taruna	1
7	Risma	5

Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

e. Kondisi Ekonomi

1. Mata Pencaharian

Data mengenai mata pencaharian penduduk ini diperoleh dari profil desa. Berikut adalah data mengenai mata pencaharian penduduk di Desa Purwotani :

Tabel 21. Mata Pencaharian Penduduk Desa Purwotani

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	5 Orang
2	Guru	9 Orang
3	Bidan/Perawat/Praktek	3 Orang
4	Karyawan Swasta	10 Orang
5	Pedagang	25 Orang
6	Petani	450 Orang
7	Tukang	12 Orang
8	Sopir	1 Orang
9	Buruh	122 Orang
11	Jasa Persewaan	1 Orang

Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

2. Pola Penggunaan Tanah

Berikut penjelasan pola penggunaan lahan Desa Purwotani :

Tabel 22. Pembagian Penggunaan Lahan Desa Purwotani

No	Lahan	Luas (Ha)
1	Peruntukan Kota Baru	1.300 Ha
2	Transmigrasi Lokal	200 Ha
3	Transmigrasi Pemekaran	250 Ha
4	Lahan Pemukiman	252 Ha
Jumlah		2.002 Ha

Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

f. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Umumnya, desa dibagi ke dalam beberapa dusun yang selanjutnya terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan desa. Berikut adalah data mengenai pembagian wilayah desa berdasarkan jumlah dusun dan RT yang ada di Desa Purwotani :

Tabel 23. Pembagian Wilayah Desa Purwotani

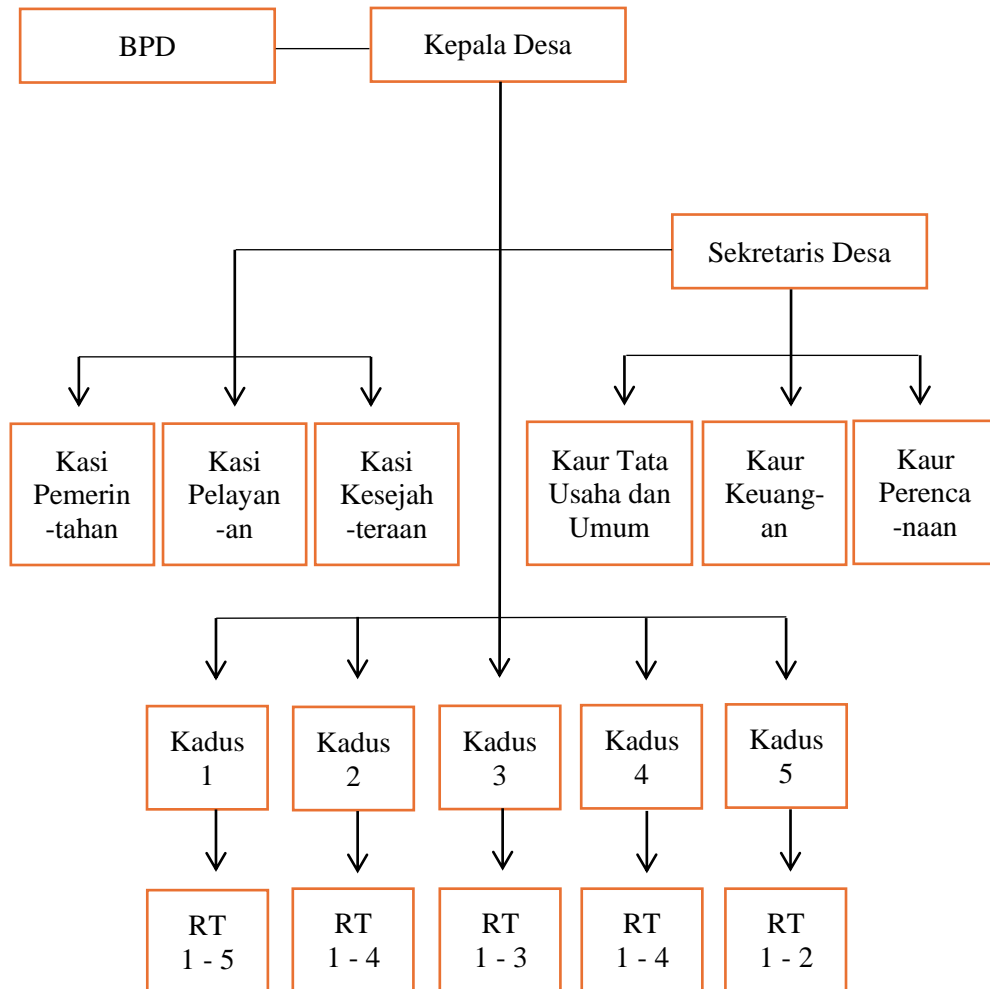
No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun 1 Hadimulyo	5
2	Dusun 2 Hadirejo	4
3	Dusun 3 Hadirukun	3
4	Dusun 4 Purwoarjo	4
5	Dusun 5 Hargo Makmur	2

Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa elemen yang saling mendukung untuk menjalankan berbagai fungsi administratif dan pelayanan publik. Berikut penjelasan struktur pemerintahan Desa Purwotani secara umum :

Gambar 7. Struktur Pemerintahan Desa Purwotani



Sumber : Profil Desa Purwotani, 2024.

4.6. Deskripsi Umum Kawasan Kota Baru

a. Kondisi Geografis

Secara spesifik, kawasan Kota Baru terletak di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kota Baru direncanakan untuk menggantikan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung saat ini, yaitu Kota Bandar Lampung. Kawasan ini terletak diantara $105^{\circ} - 105^{\circ}45^{\circ}$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15^{\circ} - 6^{\circ}$ Lintang Selatan. Kota Baru memiliki topografi yang relatif datar dengan ketinggian lahan 51 mdpl diatas permukaan laut. Jarak antara Universitas Lampung (Unila) dan Kota Baru Lampung Selatan diperkirakan sekitar 26 km dengan waktu tempuh sekitar 40 menit apabila rute yang ditempuh melalui Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Lajur tersebut relatif lurus mengikuti lintasan jalan beton hingga mencapai gerbang Kota Baru.

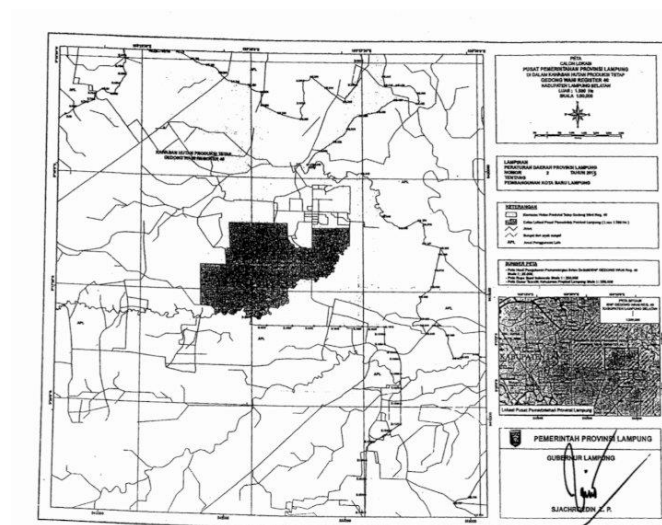
Gambar 8. Gerbang Kota Baru Lampung Selatan



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

Dalam perencanaannya, luas lahan Kota Baru yang digunakan untuk membangun pusat pemerintahan yaitu seluas 1.580 Ha yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor S.361/Menhut-VII/2012 tanggal 23 tahun 2012 (Perda Provinsi Lampung, No. 2, 2013).

Gambar 9. Peta Luas Lahan Kota Baru



Sumber : Perda Provinsi Lampung, Nomor 2, 2013.

Luas lahan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian untuk membangun berbagai gedung penting antara lain kantor gubernur, kantor DPRD, balai adat, serta masjid agung. Di sebelah gerbang utama Kota Baru, terdapat Rumah Sakit Bandar Negara Husada, sementara di sebelahnya dibangun Kantor Pekerjaan Umum. Di pusat kawasan Kota Baru terdapat sebuah lapangan melingkar yang pada sisi kirinya telah dibangun Masjid Agung, pada sisi kanannya telah dibangun kantor DPRD, sementara itu kantor Gubernur dibangun sejajar dengan lapangan tersebut.

Gambar 10. Gedung Gubernur



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

Gambar 11. Gedung DPRD



Sumber : regional.kompas.com, 2023.

Gambar 12. Masjid Agung Kota Baru



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

2. Kondisi Demografi

Kawasan Kota Baru tidak dihuni oleh penduduk setempat, namun kawasan tersebut dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam oleh petani dari tiga desa sekitar, yaitu Desa Purwotani, Desa Sindang Anom, dan Desa Sinar Rejeki. Berikut rincian jumlah dan pengelompokan petani penggarap Kota Baru :

Tabel 24. Jumlah Petani Penggarap Kota Baru

No	Jenis Keamin		Desa		
	Laki-Laki	Perempuan	Sinar Rejeki	Sindang Anom	Purwotani
1	578	122	257	237	206
Total : 700 Orang			Total : 700 Orang		

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

3. Pola Penggunaan Lahan

Kawasan Kota Baru memiliki tanah yang subur, sehingga berpotensi untuk kegiatan pertanian. Berikut rincian komoditas tanaman yang ditanam oleh petani penggarap Kota Baru :

Tabel 25. Jenis Tanaman Petani Penggarap

No	Jenis Tanaman
1	Singkong
2	Jagung
3	Padi

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

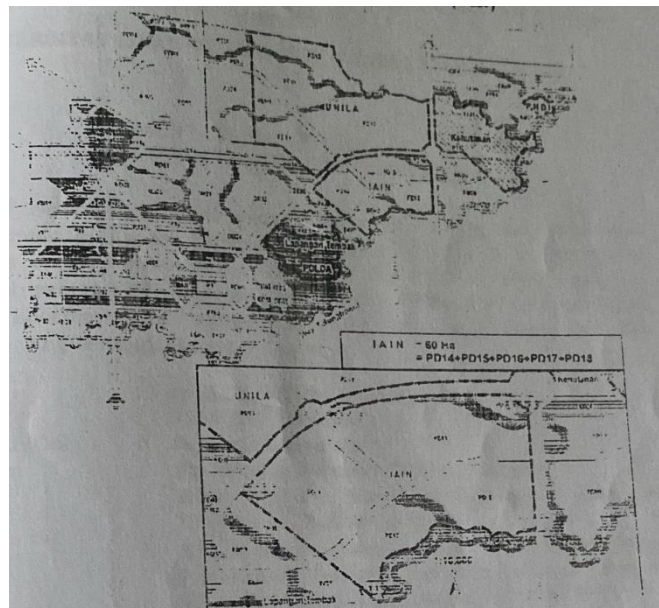
Pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan menjadikan lahan seluas 1.580 Ha atau seluruh wilayah garapan menjadikan petani Kota Baru kehilangan akses pertanian. Mangkraknya proyek tersebut menjadikan lahan Kota Baru belum terpakai sepenuhnya. Pada tahun 2018 saat masa pemerintahan Gubernur Ridho Ficardo, lahan Kota Baru dihibahkan ke beberapa instansi, sebagai berikut :

Tabel 26. Hibah Lahan Kota Baru

No	Instansi	Luas
1	Universitas Lampung	150 Ha
2	UIN Raden Intan Lampung	60 Ha
3	POLINELA	50 Ha
4	POLDA Lampung	23,7 Ha

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

Gambar 13. Peta Hibah Lahan Kota Baru



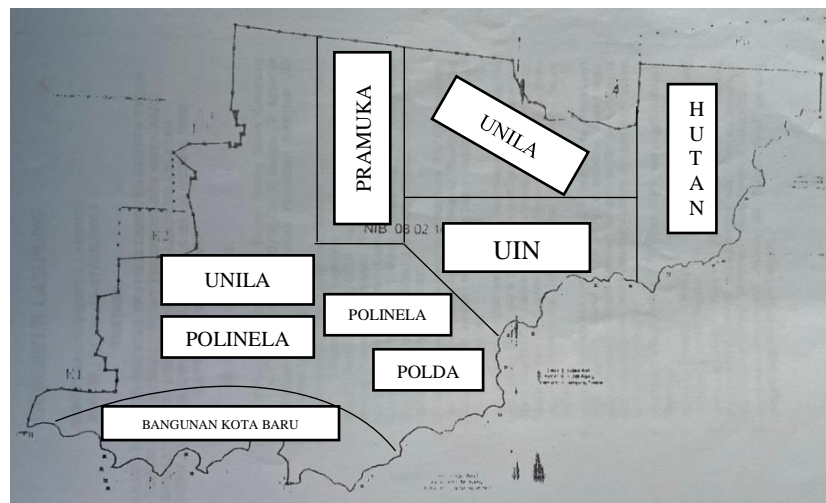
Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

Para petani penggarap yang kehilangan akses pertanian kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang telah menerima hibah lahan dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memanfaatkan lahan dengan kegiatan pertanian. Namun, pada tahun 2022, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai sewa lahan untuk masyarakat yang berminat mengelola lahan Kota Baru. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan karena lahan tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada sejumlah instansi yang seharusnya memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan kebijakan mereka. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Lampung tidak lagi memiliki hak untuk mengatur atau mengelola lahan tersebut.

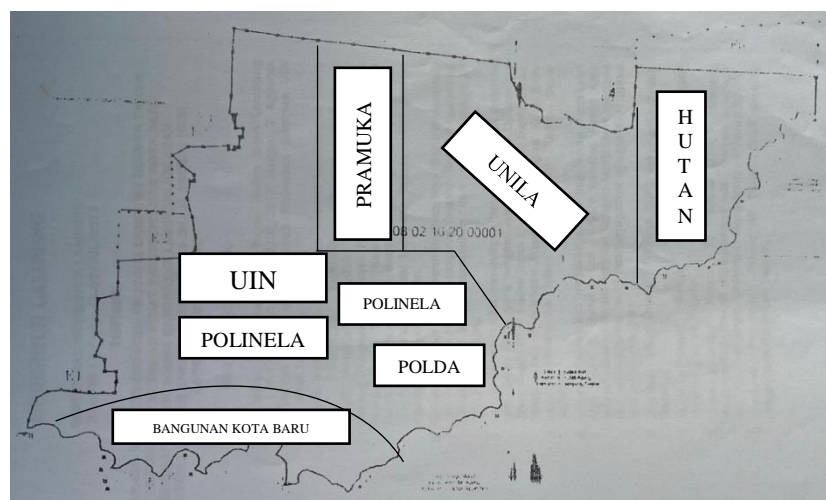
Lebih lanjut, pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menggusur tanaman singkong yang dikelola oleh petani penggarap di lahan yang telah dihibahkan kepada Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung. Sebagai instansi yang telah menerima hibah lahan tersebut, UIN Raden Intan Lampung seharusnya memiliki hak penuh untuk mengelola lahan tersebut sesuai dengan kebijakannya sendiri, termasuk menjalin kerjasama dengan petani, sementara Pemerintah Provinsi Lampung seharusnya tidak lagi memiliki kewenangan atas pengelolaan atau penguasaan lahan tersebut. Tindakan ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan kejelasan hak antar pihak yang terlibat.

Kemudian karena hal tersebut terjadi pergantian lahan hibah antara Universitas Lampung dan UIN Raden Intan Lampung. Lahan yang semula berdasarkan peta hibah tahun 2018 diberikan pada UIN Raden Intan Lampung menjadi milik Universitas Lampung. Sementara lahan UIN Raden Intan Lampung berpindah lahan berbatasan dengan gedung Pramuka. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian terkait dengan status kepemilikan dan hak pengelolaan lahan.

Gambar 14. Peta Sebelum Pergntin Hibah Lahan Kota Baru



Gambar 15. Peta Pergantian Hibah Lahan Kota Baru



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan penutup berupa kesimpulan, sekaligus untuk menerangkan kembali jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian pembahasan. Berdasarkan pemaparan materi, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut :

1. Dalam konflik agraria Kota Baru, petani penggarap memanfaatkan modal sosialnya. Dalam hal ini yaitu aliansi petani seperti LBH Bandar Lampung, WALHI Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, akademisi, mahasiswa, individu-individu, dan media massa. Mereka membantu petani dengan melakukan gerakan kolektif, seperti aksi penolakan, upaya advokasi, diskusi publik, dan pendampingan hukum. Dengan adanya aliansi perjuangan menjadi lebih efektif, karena petani mendapatkan akses untuk bisa berdialog dengan pihak-pihak yang mempunyai kebijakan melalui aliansinya dan dukungan yang lebih besar. Kepercayaan juga menjadi indikator dalam modal sosial, karena dengan adanya kepercayaan memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih baik, membangun rasa solidaritas, dan memberikan rasa aman kepada petani. Kepercayaan antara petani Kota Baru dengan aliansinya sangat kuat,

karena dibangun dan dikelola dengan pendekatan secara formal dan personal. Lebih daripada itu, adanya norma berhasil mengorganisir berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi membantu petani Kota Baru memperjuangkan hak-haknya.

2. Modal sosial yang digunakan petani Kota Baru adalah modal sosial menghubungkan, karena melalui modal sosial ini petani Kota Baru mendapatkan bantuan hukum dan memiliki akses untuk melakukan advokasi ke pihak yang lebih tinggi.
3. Resiliensi petani Kota Baru dengan memanfaatkan modal sosial dalam menghadapi konflik semakin meningkatkan ketahanan petani. Aliansi menumbuhkan rasa solidaritas diantara petani, semangat perjuangan dan ketahanan diri yang kuat. Sampai saat penulisan ini, petani Kota Baru masih menunjukkan solidaritas dan semangat untuk terus berjuang. Aliansi melakukan pengorganisasian untuk menjaga ketahanan petani.
4. Secara keseluruhan dalam konteks penelitian ini, modal sosial menjadi instrumen yang dapat meningkatkan resiliensi petani Kota Baru dalam menghadapi konflik agraria. Ketahanan ini ditunjukkan dengan keberlanjutan perjuangan agraria di Kota Baru dari tahun 2011 – 2025. Meskipun petani Kota Baru mendapatkan berbagai bentuk represi dari aparat, petani Kota Baru menunjukkan ketahanannya diri yang kuat dalam melakukan perjuangan dan semangat untuk mempertahankan hak mereka.

6.2. Saran

1. Saran bagi Petani Penggarap Kota Baru

Sangat diperlukan kesamaan pendapat dan solidaritas petani dengan terlibat aktif dalam upaya bersama demi menjaga kelangsungan perjuangan, mencegah terjadinya perpecahan, atau mundurnya sebagian petani dari perjuangan. Diperlukan pembinaan bagi pemuda desa agar tercipta regenerasi yang mampu melanjutkan apa yang telah diperjuangkan.

2. Saran bagi Pemerintah

Sebagai pemegang kebijakan diharuskan memiliki sikap keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, mampu mendengar aspirasi yang disampaikan, dan mampu membangun komunikasi konstruktif dengan masyarakat agar terciptanya kesepakatan yang adil.

3. Saran bagi Calon Peneliti Berikutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian mengenai dinamika internal petani Kota Baru, khususnya terkait perbedaan pandangan mengenai pengelolaan tanah dan akses lahan yang dapat memengaruhi solidaritas dan ketahanan perjuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Alfitri. (2023). Pengukuran Modal Sosial. Idea Press Yogyakarta.

Field, J. (2003). Modal Sosial. Penerbit Kreasi Wacana, Bantul.

Mustafa, P.S., dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga. Penerbit Insight Mediatama, Mojokerto.

Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial. CV Saga Jawadwipa, PUSTAKA SAGA. Surabaya.

JURNAL :

Achsanuddin, U.A.A., dkk. (2023). Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 6 ; 290-295.

Akbar, S.M. (2022). Dinamika Gerakan Perjuangan Agraria Suku Anak Dalam (SAD) Bathin Sembilan Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari terhadap Industri Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11 (2), 101-116.

Boediningsih, W., & Cahyono, S.B. (2013). Alih Fungsi Lahan Pertanian Berpengaruh pada Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan di Indonesia. Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Pro Hukum; Jurnal Penelitian Bidang Hukum*. Vol. 12, No. 3.

Diwantoro, D.B. (2023). Upaya Pergerakan Organisasi Petani dalam Penyelesaian Konflik Agraria, studi kasus pada serikat tani korban gusuran lahan PT. BNIL di Desa Bujuk, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.

- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat. Pusat Penelitian dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Vol.3, No.2.
- Fadli, M.R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kaulitatif. Universitas Negeri Yogyakarta. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Vol. 21, No. 1 : 33-54.
- Fuad, F.H., & Maskanah, S. (2000). Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Pustaka Latin, Bogor.
- Izudin, A. dan Suyanto (2019). Gerakan Sosial Warga Parangkusumo pada Kasus Penggusuran Lahan untuk pembangunan *Geo Maritim Park*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Lubis, A.H., dkk. (2024). Resiliensi : Kemampuan Beradaptasi dan Bertahan dalam Menghadapi Tantangan Hidup yang Sulit. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling. Vol. 2, No. 3.
- Maulana, I.R., & Shohibuddin, M. (2022). Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor. Institut Pertanian Bogor. POLITIK: Jurnal Ilmu Politik. Vol. 13, No. 1.
- Maryani. (2023). Pengaruh Resiliensi terhadap Kecenderungan Prokrastinasi Akademik dan Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Universitas Lampung. Universitas Lampung.
- Nugroho, A.C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). BPSDMP Kominfo Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jawa Tengah.
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Uha Laundry Bunda. STIE-GK Muara Bulian, Jambi. Jurnal Mahasiswa, Vol. 1 : 117-128.
- Pratiwi, S.A., & Yuliandri, B.S. (2022). Antecedent dan Hasil dari Resiliensi. Universitas Islam Indonesia. Motiva: Jurnal Psikologi, Vol.5, No.1 : 8-15.
- Runtoko, P. (2010). Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Status Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian di Kabupaten Bantul. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Setiarsih, K.A. (2012). Konflik Perebutan Lahan antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setyowati, D. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution Perspektif Hak Asasi Manusia.

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Suharto, M.P., & Basar, G.K. (2019). Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Universitas Padjadran. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol. 1, No. 1 : 1-170.

Syakra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol 5, No 1.

Tualeka, W.N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal Al-Hikmah, Vol 3., no. 1.

Wanseri. (2019). Kajian Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Milik Perorangan yang Berasal dari Tanah Negara. Universitas Medan Area, Medan.

Yusrin, N., & Kurniaty, D. (2023). Pengaruh Resiliensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Departemen Business Operation PT AXA Mandiri Financial Services. Universitas Paramadina. Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani. Vol. 5, No. 1.

Zakie, M. (2016). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. Universitas Islam Indonesia. Jurnal Legality. Vol. 24, No. 1 : 40-55.

Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode *Outdoor Learning* dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran. Vol. 3, No. 2.

WEBSITE :

Diskursus Net. (2022, 25 November). Sewa Lahan Pertanian di Kota Baru, Haruskah?? 7PM at Lampung. *YouTube*.
<https://www.youtube.com/live/EZHQQAU1syo?si=0m-4vsKU9anrk4uT>

Darma, I.D. (2024). Perusakan Traktor di Lahan Kota Baru Sulut Tindakan Hukum. *Clickinfo.co.id*. <https://clickinfo.co.id/detailpost/perusakan-traktor-di-lahan-kota-baru-sulut-tindakan-hukum>

Amri, A. (2024). Cerita Sindi, Anak Petani Singkong Kota Baru yang Lahannya Digusur Pemprov Lampung. *Rmollampung.id*.
<https://www.rmollampung.id/cerita-sindi-anak-petani-singkong-kota-baru-yang-lahannya-digusurpemprovlampung>

Ferrer, V.S. (2024). Lahan 2 Ha Rusak akibat Penggusuran, Petani Kota Baru Laporan ke Polda Lampung. *Tribunnews.com*.
<https://lampung.tribunnews.com/amp/2024/03/20/lahan-2-ha-rusak-akibat-penggusuran-petani-kota-baru-laporan-ke-polda-lampung>

- Nashrullah, N. (2024). Petani Penggarap Lahan Kota Baru Lampung yang Terbengkalai Tolak Sewa. *News.republika.co.id*. <https://news.republika.co.id/berita/s71z2j320/petani-penggarap-lahan-kota-baru-lampung-yang-terbengkalai-tolak-sewa>
- Josua. (2024). Kriminalisasi Petani Kotabaru Masih Berlanjut. *Daswati.id*. <https://daswati.id/kriminalisasi-petani-kotabaru-masih-berlanjut/>
- Khoiriah, S. (2023). Ratusan Petani Penggarap Lahan Kota Baru Kembali Geruduk Kantor DPRD Lampung. *Kupastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2023/01/04/ratusan-petani-penggarap-lahan-kota-baru-kembali-geruduk-kantor-dprd-lampung>
- Khoiriah. (2023). Petani Kota Baru Tuntut SK Sewa Lahan Dicabut, Begini Respon Pemprov Lampung. *kupastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2023/09/25/petani-kota-baru-tuntut-sk-sewa-lahan-dicabut-begini-respon-pemprov-lampung>
- Lahan Garapan Kota Baru Digusur, Masyarakat Melapor Polda Lampung. *Nenemonews.com*. <https://nenemonews.com/2024/03/20/lahan-garapan-kotabaru-digusur-masyarakat-melapor-polda-lampung/>
- Lahan Tergusur, Petani Kota Baru Diproses Hukum. *Lampung.com*. <https://www.lampung.com/lahan-tergusur-petani-kotabaru-diproses-hukum/>
- LBH Bandar Lampung Dampingi Petani Lampung Gruduk Menteri ATR/BPN. *Ylbhi.or.id*. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lbh-bandar-lampung-dampingi-petani-lampung-gruduk-menteri-atr-bpn/>
- Riduan, A. (2023). Ratusan Petani Minta Pemprov Lampung Cabut SK Sewa Lahan di Kota Baru. *Saibumi.com*. <https://www.saibumi.com/artikel-120909-ratusan-petani-gelar-aksi-tagih-janji-penyelesaian-sk-sewa-lahan-di-kota-baru.html>
- Saputra, T. (2023). Hari Tani Nasional, Ratusan Petani di Lampung Unjuk Rasa terhadap Pemprov. *Detik.com*. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6950029/hari-tani-nasional-ratusan-petani-di-lampung-unjuk-rasa-terhadap-pemprov#goog_rewarded
- Setiawan, B. (2024). Para Petani Bersama LBH Bandar Lampung Tolak Sewa Lahan Kota Baru. *Medialampung.disway.id*. <https://medialampung.disway.id/read/656032/para-petani-bersama-lbh-bandar-lampung-tolak-sewa-lahan-kota-baru>
- SK Gubernur Lampung tentang Sewa Lahan Kota Baru Cenderung Meminggirkan Para Petani. *Mediarepublika.com*. <https://mediarepublika.com/sk-gubernur-lampung-tentang-sewa-lahan-kota-baru-cenderung-meminggirkan-para-petani/>

Soal Sewa Lahan Kota Baru, ini Penjelasan Pemprov Lampung.
Bongkarpost.co.id. <https://bongkarpost.co.id/soal-sewa-lahan-kota-baru-ini-penjelasan-pemprov-lampung/>

Yulisa, L. (2024). 60 Tahun Provinsi Lampung; LBH Soroti Magkraknya Pembangunan Ibu Kota Baru dan Praktik Penggusuran Petani.
Metrolampungnews. <https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/lampung/pr-1367865043/60-tahun-provinsi-lampung-lbh-soroti-mangkraknya-pembangunan-ibu-kota-baru-dan-praktik-penggusuran-petani?page=all>

PERATURAN PEMERINTAH :

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang RT/RW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Kota Baru Lampung.

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/293/V1.02/HK/2022 tentang penetapan sewa lahan di tanah Pusat Kota Baru.